

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**LATAR BELAKANG DAN AKIBAT DIKELUARKANNYA
AMANAT 5 SEPTEMBER 1945**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh :

BIMO SETYOSENO

NIM : 961314005

NIRM : 960051120604120004

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2001**

SKRIPSI

LATAR BELAKANG DAN AKIBAT DIKELUARKANNYA
AMANAT 5 SEPTEMBER 1945

Oleh :

Bimo Setyoseno

NIM : 961314005

NIRM : 960051120604120004

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. P.J Soewarno, S.H

tanggal 22 Agustus 2001

Pembimbing II



Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M

tanggal 22 Agustus 2001

SKRIPSI
LATAR BELAKANG DAN AKIBAT DIKELUARKANNYA
AMANAT 5 SEPTEMBER 1945

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

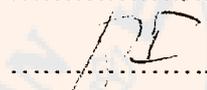
Bimo Setyoseno

NIM : 961314005

NIRM : 960051120604120004

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 5 September 2001
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Panitia Penguji

	Nama lengkap	Tanda tangan
Ketua	Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R	
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M.Pd	
Anggota	Prof. Dr. P.J Soewarno, S.H	
Anggota	Drs. A.K Wiharyanto, M.M	
Anggota	Drs. B. Musidi, M.Pd	

Yogyakarta, 14 November 2001
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan,

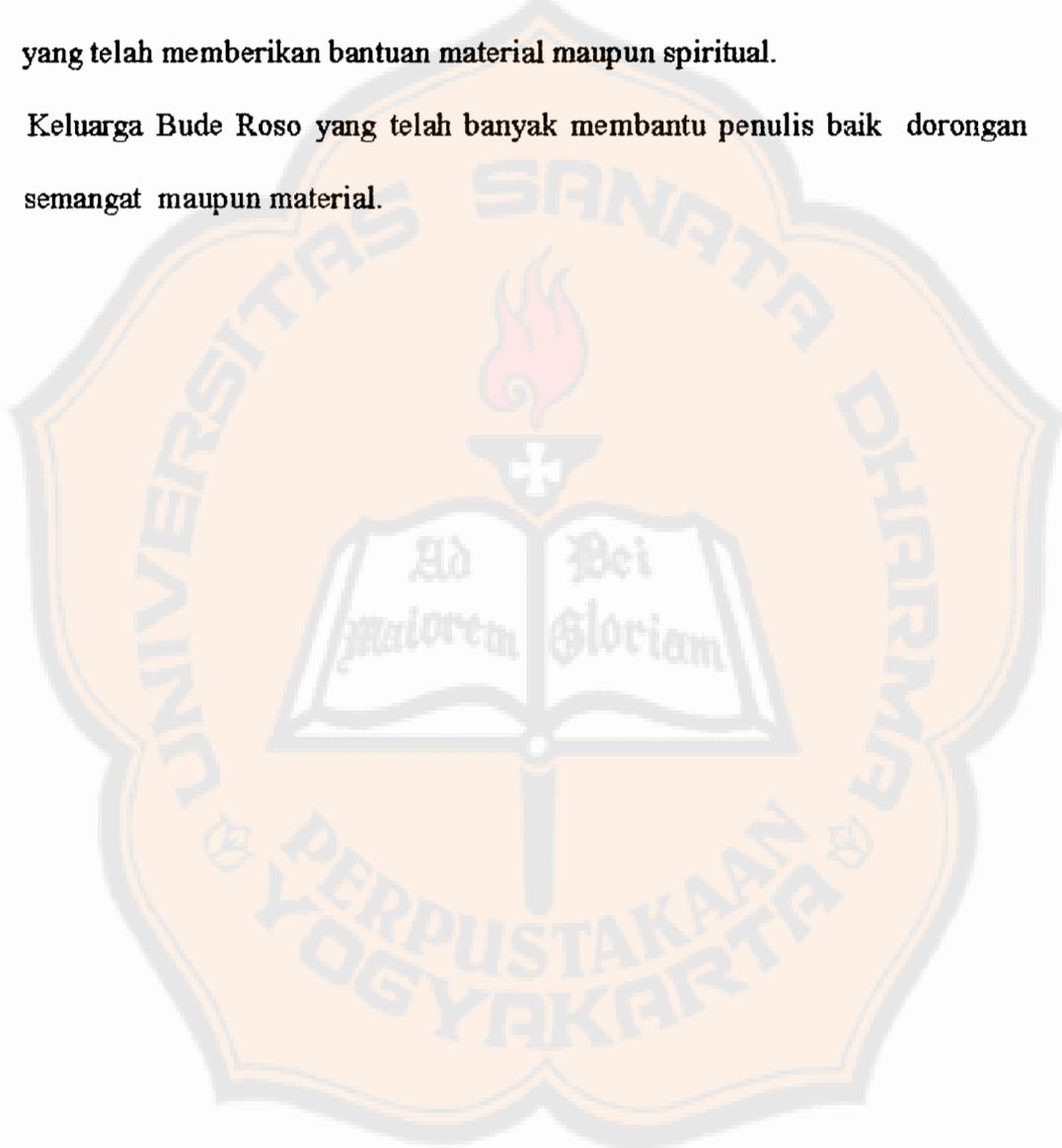


Dr. A.M. Slamet Soewandi, M.Pd

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang tua , kakak sekaligus guru bagi penulis mbak No & Thomas, mas Uut yang telah memberikan bantuan material maupun spiritual.
2. Keluarga Bude Roso yang telah banyak membantu penulis baik dorongan semangat maupun material.



MOTTO

“BANYAK BELAJAR DARI ORANG LAIN”

“GITU SAJA KOK REPOT”

“BANYAK MAKAN DAN TIDUR TERATUR”

“PERBANYAK HUMOR”

“KONSENTRASI”

“RASIONAL”

“PERHITUNGAN”

“ENJOY”

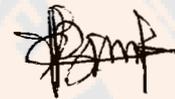
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

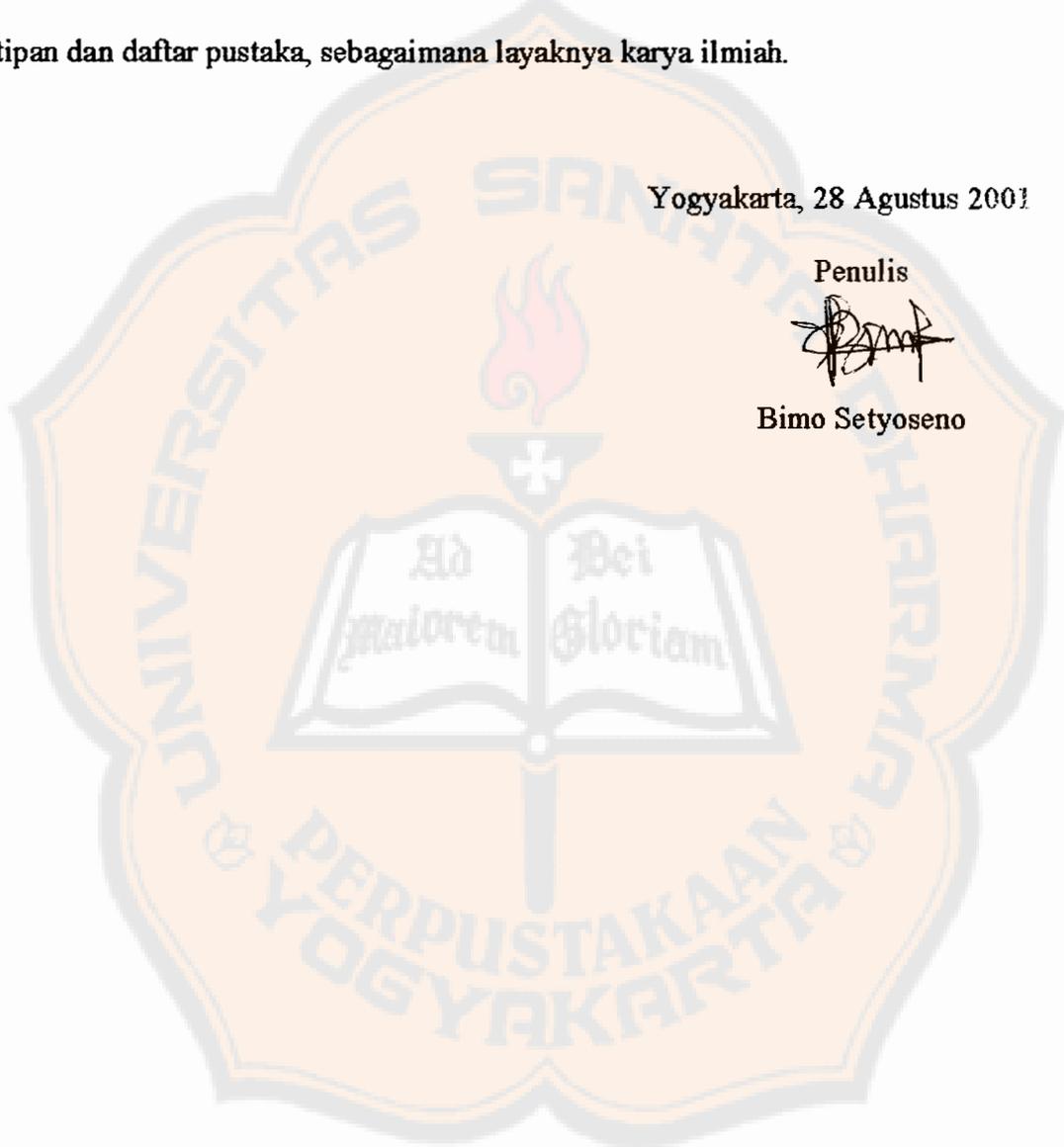
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 28 Agustus 2001

Penulis



Bimo Setyoseno



ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yaitu situasi politik Yogyakarta dari masa pendudukan Jepang sampai dikeluarkannya Amanat 5 September 1945, faktor-faktor politik yang mendorong dikeluarkannya Amanat 5 September 1945, akibat politik yang ditimbulkan setelah dikeluarkannya Amanat 5 September 1945.

Metode yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sistem pemerintahan Jepang yang berlangsung antara tahun 1942-1945 memberikan kesempatan bagi Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengatur sendiri pemerintahan wilayah Yogyakarta, melalui tindakannya menghapuskan jabatan *Pepatih Dalem*. Penghapusan jabatan *Pepatih Dalem* ini mempunyai implikasi Sri Sultan sendirilah yang mengambil alih kepemimpinan secara langsung atas daerah Yogyakarta.

Dengan demikian Sri Sultan Hamengku Buwono IX dapat mewujudkan pemikirannya (anti imperialisme dan kolonialisme) melalui tindakannya mendukung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu peran aktif dari seluruh komponen masyarakat Yogyakarta semakin menambah kekuatan melawan Jepang. Persatuan antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan seluruh komponen masyarakat Yogyakarta inilah akhirnya terwujud di dalam Amanat 5 September 1945.

Konsekuensi dikeluarkannya Amanat 5 September 1945, menyebabkan baik Sri Sultan dan seluruh komponen masyarakat Yogyakarta memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan tekadnya itu. Melalui Amanat 5 September 1945 Sri Sultan beserta seluruh komponen masyarakat Yogyakarta mengkonsolidasikan kekuatan untuk melawan penjajah Jepang. Kekuatan ini semakin lama tidak dapat dibendung lagi yang mengakibatkan terjadinya konflik dengan pihak Jepang baik secara diplomasi maupun kekerasan. Puncak dari konflik itu terakumulasi di dalam pertempuran Kota Baru pada 7 Oktober 1945.

ABSTRACT

This research aimed at finding answers for some questions about political situation in Yogyakarta from the colonialism of Japanese to the issue of 5 September 1945 Instruction, political factors that urged the issue of 5 September 1945 Instruction, and effect of the issue of 5 September 1945 Instruction.

The method used in this research was analytical descriptive.

The result of this thesis showed that the system of Japanese government in 1942 – 1945 had given opportunity for Sri Sultan Hamengku Buwono IX to govern Yogyakarta without Japanese's intervention, mentioned by the deletion of Papatih Dalem position. This action had the implication that Sri Sultan himself that took over the leadership of Yogyakarta directly.

So, Sri Sultan Hamengku Buwono IX could realize his thought (anti imperialism and colonialism) through an action that supported the independence of Indonesia. Besides, active supports from all components in Yogyakarta increased the force to fight against Japanese. The unity of Sri Sultan Hamengku Buwono IX and all components in Yogyakarta at last was realized in 5 September 1945 Instruction.

The consequence of the issue of 5 September 1945 Instruction was that both Sri Sultan and all components in Yogyakarta had definite responsibility to do their struggle. Through 5 September 1945 Instruction, Sri Sultan together with all components in Yogyakarta consolidated them to fight against Japanese. Through time, this force was irresistible. Conflicts against Japanese, both diplomacy and physic could not be avoided. And the final was a war in Kota Baru in 7 October 1945.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " Latar Belakang dan Akibat Dikeluarkannya Amanat 5 September 1945".

Penyusunan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua penulis yang telah memberi dorongan spiritual maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. P.J Soewarno, S.H selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah memberi bimbingan dan petunjuk-petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
5. Bapak Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengoreksi skripsi hingga selesai.
6. Karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan literatur yang diperlukan penulis.
7. Karyawan Perpustakaan Museum Benteng Vredeburg

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Rekan-rekan seperjuangan Putut, Duto, Beny, Robert, Yuli, Tanty, Yudha, Sarbini, Daniel, Inno (Petrus Piru) terima kasih atas pinjaman buku-buku kuliahnya, Sahad, Agni, Sr. Vero, Dani, Erni, Anik, Minda, Asti, Yanti, Erlin, Ida, Romana, Eko Nugroho atas sarannya sehingga penulis dapat menemukan judul skripsi ini dan tak lupa penulis juga ucapkan terima kasih kepada mas Yos atas bimbingan komputernya, Budi atas terjemahan abstraknya, juga rekan-rekan kru parkir Sandiman, Bega, pak Kemis, pak Totok dan Gepenk yang telah mengisi hari-hari semasa kuliah dengan hiburan dan obrolan-obrolan segarnya sehingga penulis selalu merasa 'fresh' dan lain-lain teman seperjuangan yang masih berkuat dengan perjuangannya Suko, Yanto (be real man guys and always try and try your best, Good luck!!).
9. Semua rekan dari segala penjuru angkatan Prodi Pendidikan Sejarah yang mengenal penulis. Terima kasih atas segala perhatian, dorongan semangat dan penghiburan yang telah diberikan selama masa kuliah sampai penulisan skripsi ini selesai. Sekali lagi terima kasih!!!
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segala hal yang berhubungan dengan skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis. Akhir kata dengan menyadari segala kelemahan dan kekurangan, maka segala kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini diterima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Penulis



DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	12
BAB II YOGYAKARTA DARI MASA PENDUDUKAN JEPANG SAMPAI DIKELUARKANNYA AMANAT 5 SEPTEMBER 1945.....	18
A. Sistem Pemerintahan Jepang di Yogyakarta.....	18
B. Penghapusan Jabatan Papatih Dalem Oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.....	24
1. Papatih Dalem.....	25
2. Upaya Penghapusan Papatih Dalem.....	27
C. Proklamasi Kemerdekaan RI dan Reaksi Rakyat Yogyakarta Terhadap Dikeluarkannya Proklamasi Kemerdekaan RI.....	31

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III FAKTOR-FAKTOR POLITIK YANG MENDORONG DIKELUARKANNYA AMANAT 5 SEPTEMBER 1945.....	41
A. Pemikiran Politis Sri Sultan Hamengku Buwono IX.....	41
B. Tindakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX Dalam Melawan Imperialisme dan Kolonialisme.....	48
C. Dukungan Rakyat Yogyakarta Terhadap Langkah-Langkah Yang telah ditempuh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.....	53
 BAB IV AKIBAT POLITIK DIKELUARKANNYA AMANAT 5 SEPTEMBER 1945.....	 57
A. Upaya Politis Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Masyarakat Yogyakarta Mengkonsolidasikan Kekuatan.....	57
B. Kekuatan Rakyat Yogyakarta versus Kekuatan Jepang.....	60
 BAB V KESIMPULAN.....	 72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yogyakarta sebagai bagian wilayah dari Republik Indonesia memiliki nuansa/keunikan tersendiri. Selain memang dipandang sebagai kota yang sarat akan kebudayaan tradisional, secara politis pun kota ini memiliki keunikan. Keunikan itu sendiri tercermin di dalam sistem pemerintahannya yang dibentuk berdasarkan landasan historis yaitu berupa kerajaan. Sebagai sebuah warisan dari Kerajaan Mataram, Yogyakarta masih meneruskan tradisi pendahulunya itu. Sistem pemerintahannya dalam hal ini dipegang oleh seorang raja sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi.

Dalam kedudukan sebagai penguasa kerajaan memang raja berhak mengambil tindakan apa saja dan dengan cara bagaimanapun terhadap kerajaannya, segala isi yang ada di dalamnya, termasuk hidup manusia. Oleh karena itu kalau raja menginginkan sesuatu, dengan mudah ia akan memerintahkan untuk mengambilnya. Namun raja yang dikatakan baik adalah raja yang menjalankan kekuasaannya dalam keseimbangan antara kewenangannya yang besar dengan kewajibannya yang besar juga. Inilah yang dirumuskan dalam konsep

"berbudi bawa leksana, ambeg adil paramarta" (meluap budi luhur mulia dan sifatnya adil terhadap semua yang hidup atau adil dan penuh kasih)¹. Begitu besarlah kemurahan hatinya tanpa mengenal batas. Raja yang demikian itu telah menjalankan "*anjaga tata tentreming praja*". Raja yang secara konsekuen menjalankan konsep ini selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, bersikap murah hati, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, makan kepada mereka yang kelaparan, topi kepada mereka yang kepanasan, tongkat kepada mereka yang kelicinan. Itulah sifat raja yang bijaksana. Raja yang demikian itu pada akhirnya akan mendapat kepercayaan dari rakyatnya. Semua orang rela pasrah kepada rajanya karena mereka tahu dengan ciri watak yang demikian itu hanya mendatangkan serta kebaikan bagi dirinya maupun banyak orang tanpa kecuali. Di lain pihak rajapun kemudian merasa pula mempunyai hak dan kekuasaan mutlak untuk mengatur kerajaannya². Pada akhirnya apabila semua ini dapat dipenuhi oleh sang raja diharapkan tercapai "*jumbuhing kawula lan gusti*" (persatuan antara raja dan rakyatnya) yang merupakan modal dasar baik bagi raja maupun rakyat untuk menjaga

¹ G. Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram*, Kanisius, Yogyakarta, 1987, hlm. 78.

² *Ibid*, hlm. 80-81.

"*tata tentreming praja*" (saling peduli dan saling memiliki untuk menjaga ketentraman kerajaan).

Hal ini disadari betul oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai seorang pemegang kekuasaan wilayah Yogyakarta setelah menggantikan ayahandanya Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Dengan tekad yang kuat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan diilhami semangat perjuangan nenek moyangnya seperti Sultan Agung, Sri Sultan Hamengku Buwono I dan Pangeran Diponegoro, Sri Sultan berupaya mengembalikan kepercayaan rakyat Yogyakarta terhadap kepemimpinannya. Rakyat yang sudah terlanjur mencap bahwa penguasa-penguasa kerajaan merupakan antek kolonial perlahan-lahan mulai dihilangkan. Tekadnya tampak pada pidato pelantikan pada 18 Maret 1940. Sri Sultan mengucapkan pidato yang bernada progresif. Dalam pidato itu Sri Sultan sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ia adalah seorang nasionalis yang sangat mendambakan sebuah negara yang berdaulat terlepas dari belenggu penjajahan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan cita-citanya itu sebenarnya sudah tercermin mulai masa penjajahan Belanda ketika ia memberi perlawanan diplomasi terhadap Gubernur Jenderal Belanda yaitu Dr Lucien Adam. Pada waktu itu terlihat bagaimana Sri Sultan Hamengku Buwono IX sangat bersikeras berketetapan pada

pendiriannya untuk tidak menandatangani kontrak politik dengan Belanda oleh karena Sri Sultan Hamengku Buwono IX sendiri menyadari bahwa apabila hal itu dilakukannya berarti akan mengakibatkan semakin berkuasanya pihak Belanda³. Hal lain yang mencerminkan sikapnya demi melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan adalah upayanya untuk menghapuskan jabatan *Pepatih Dalem* yang pada masa penjajahan Belanda, jabatan ini masih eksis. Pada masa pendudukan Jepang yang tentunya memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan masa penjajahan Belanda, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menginginkan jabatan *Pepatih Dalem* ini dihapuskan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar pihak penjajah tidak begitu saja dapat mengadu domba antara dirinya selaku penguasa tertinggi di Yogyakarta dengan *Pepatih Dalem*. Maka dengan dihapuskannya jabatan *Pepatih Dalem* memberi keleluasaan bagi Sri Sultan Hamengku Buwono IX memerintah atas wilayah Yogyakarta.

Keleluasaan ini benar-benar dimanfaatkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengadakan kontak lebih dekat dengan rakyatnya. Hal ini disadari oleh Sri Sultan apabila hubungan ini

³ Atmakusumah (perry), *Tahta Untuk Rakyat Celah-Celah Kehidupan Hamengku Buwono IX*, PT Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 117.

semakin intens dilakukan akan memunculkan kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi pihak penjajah yang selalu menginjak-injak hak-hak rakyat dan merampas segala sumber daya alam yang ada. Jadi politik Sri Sultan ini dapat dikatakan sebagai masa persiapan baginya dan juga rakyat Yogyakarta untuk menghadapi saat yang bersejarah yang nantinya apa yang kita kenal sebagai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan dikeluarkannya Amanat 5 September 1945 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai bukti dukungan terhadap Republik Indonesia yang sudah memproklamkan kemerdekaannya.

Dengan dikeluarkannya Amanat 5 September 1945 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mempunyai makna tercapai suatu puncak "*jumbuhing kawula lan gusti*" (bersatunya antara pemimpin/penguasa dengan rakyatnya) yang pada masa penjajahan sulit untuk didapatkan. Ketegasan sikap pemimpin-pemimpin Yogyakarta menindaklanjuti Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ternyata juga merupakan suatu tindakan penyelamatan atas keutuhan persatuan dan tegaknya negara Republik Indonesia, karena dengan dikeluarkannya Amanat 5 September 1945 mempunyai arti baik Kasultanan maupun Paku Alaman tidak dapat

diadu domba dengan Republik Indonesia⁴. Terutama tampak pada pernyataan sebagai daerah istimewa dari Republik Indonesia.

Secara psikologis pernyataan kedua tokoh pemimpin ini telah mendekatkan rakyat dengan pemimpin yang dipercaya langsung tanpa penghubung seperti halnya pada masa terdapat *Pepatih Dalem*. Hubungan itu telah menumbuhkan semangat revolusi, semangat berkorban untuk tegaknya Republik Indonesia. Secara tidak langsung merupakan tindakan pertahanan atas keberadaan daerah Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Dengan demikian dapatlah dikatakan Amanat 5 September 1945 itu merupakan gerakan terbuka pertama kali terhadap Pemerintahan Tentara Jepang di Yogyakarta yang sekaligus merupakan isyarat atau bahkan komando bagi rakyat untuk bergerak. Amanat 5 September 1945 itu seolah mendapat legalisasi dari pemerintah Republik Indonesia, ketika dua orang menteri negara utusan Presiden Republik Indonesia datang di Yogyakarta pada tanggal 6 September 1945. Mereka menyerahkan piagam kedudukan Sri Sultan dan Paku Alam masing-masing tetap pada kedudukannya dan ditegaskan bahwa daerah Yogyakarta dan

⁴ Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah DIY, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di DIY*, Dep P dan K, Yogyakarta, 1986, hlm. 57.

Paku Alaman masing-masing merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia⁵.

Melihat begitu besarnya pengaruh Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII, penulis justru tertarik pada suatu proses yang melatarbelakangi dikeluarkannya Amanat 5 September 1945 karena amanat itu tentu dicapai tidak semudah membalikkan telapak tangan namun diperoleh dari adanya rangkaian proses sejarah yang tentunya pula menghadapi banyak tantangan. Dengan demikian sebenarnya dapat dikatakan bahwa Amanat 5 September 1945 merupakan bagian dari suatu proses perjalanan sejarah yang ditempuh bersama-sama antara penguasa Yogyakarta dalam hal ini Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII dengan seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta dalam melawan segala bentuk imperialisme dan kolonialisme. Dalam hal ini penulis membatasi proses perjalanan sejarah rakyat Yogyakarta sampai Amanat 5 September 1945, karena peristiwa ini penulis anggap dapat mewakili suatu puncak keberhasilan dari suatu perjuangan keras atau dapat dikatakan pula sebagai sesuatu yang revolusioner yang pernah dicapai rakyat Yogyakarta dalam melawan penindasan

⁵ P.J Soewarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm. 85.

penjajah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Amanat 5 September 1945 sebagai suatu "proklamasi kemerdekaan" Yogyakarta dari penjajahan Jepang⁶.

Untuk menjaga kesinambungan dalam penulisan jalannya suatu proses sejarah, penulis juga akan membahas akibat yang ditimbulkan pasca Amanat 5 September 1945 itu dikeluarkan. Dalam hidup ini ada suatu prinsip "siapa berani berbuat dia juga harus berani menanggung resikonya pula". Masalah ini yang harus dihadapi oleh rakyat Yogyakarta sebagai konsekuensi apa yang telah diperbuatnya itu. Mereka mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang mereka sudah cita-citakan bersama. Sri Sultan Hamengku Buwono IX beserta seluruh masyarakat Yogyakarta dipacu oleh rasa kebangsaan yang tinggi berusaha keras untuk mempertahankan tekadnya itu demi kepentingan nusa dan bangsa dan juga demi melaksanakan apa yang sudah dicita-citakan dan dikonkritkan bersama-sama melalui Amanat 5 September 1945.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, perlu dijabarkan permasalahan sebagai berikut :

⁶ *Ibid*, hlm. 170-171

1. Bagaimana keadaan politik Yogyakarta dari masa pendudukan Jepang sampai dikeluarkannya Amanat 5 September 1945?
2. Faktor-faktor politik apa yang mendorong dikeluarkannya Amanat 5 September 1945?
3. Bagaimana akibat politik yang ditimbulkan setelah dikeluarkannya Amanat 5 September 1945

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh gambaran dan menganalisa keadaan politik Yogyakarta dari masa pendudukan Jepang sampai dikeluarkannya Amanat 5 September 1945 (1942-1945).
2. Menjelaskan faktor-faktor politik yang mendorong dikeluarkannya Amanat 5 September 1945.
3. Memperoleh gambaran dan menganalisa akibat politik yang ditimbulkan setelah dikeluarkannya Amanat 5 September 1945.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari penulisan skripsi yang berjudul "Latar Belakang dan Akibat dikeluarkannya Amanat 5 September 1945" ini akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Penulisan ini bermanfaat untuk menunjukkan bahwa dikeluarkannya Amanat 5 September 1945 diperoleh melalui suatu perjuangan dan pengorbanan yang besar dari rakyat Yogyakarta dalam melawan imperialisme dan kolonialisme.
2. Penulisan ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan bagi generasi-generasi selanjutnya sehingga tidak lupa sejarah perjuangan bangsanya

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini membahas tentang latar belakang dan akibat dikeluarkannya Amanat 5 September 1945 khususnya ditinjau dari aspek politik. Untuk membahas hal ini, penulis mempergunakan buku karangan P.J Soewarno, **Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974**, Kanisius, Yogyakarta, 1994, buku acuan pokok untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada.

Untuk membahas kondisi politik Yogyakarta dari masa pendudukan Jepang sampai dikeluarkannya Amanat 5 September 1945, penulis mempergunakan buku-buku karangan Soedarisman Poerwoekoesoemo, **Daerah Istimewa Yogyakarta**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1984 dan buku Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah DIY, **Sejarah Revolusi**

Kemerdekaan (1945-1949) di DIY, Depdikbud, Yogyakarta, 1986.

Di dalam buku-buku ini dibahas mengenai kondisi politis yang memungkinkan Sri Sultan dapat bertindak selaras dengan pemikirannya (anti imperialisme dan kolonialisme). Kondisi politik yang dimaksud adalah sistem pemerintahan Jepang yang berlangsung antara tahun 1942-1945 memberi kelonggaran bagi Sri Sultan untuk mengatur sendiri pemerintahan di Yogyakarta. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Sri Sultan untuk menghapuskan jabatan Papatih Dalem dan mendukung dikeluarkannya Proklamasi Kemerdekaan RI. Tindakannya ini didukung oleh seluruh komponen masyarakat sehingga menambah kekuatan untuk melawan penjajah Jepang.

Mengenai faktor-faktor politik yang menyebabkan dikeluarkannya Amanat 5 September 1945, penulis menggunakan buku-buku karangan G. Moedjanto, **Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman**, Kanisius, Yogyakarta, 1994, buku karangan Soedarisman Poerwoekoesoemo, **Daerah Istimewa Yogyakarta**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1984. Faktor politik yang dimaksud adalah hal-hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya Amanat 5 September 1945, baik itu dari pemikiran dan tindakan politis Sri Sultan yang sangat menentang imperialisme dan kolonialisme maupun dari dukungan politis rakyat Yogyakarta

yang juga menginginkan hal yang sama seperti pemimpinnya tersebut.

Untuk membahas akibat politik yang ditimbulkan setelah dikeluarkannya Amanat 5 September 1945, penulis mempergunakan buku karangan P.J Soewarno, **Yogyakarta Di Awal Revolusi Kemerdekaan**, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 1994. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan berbagai upaya yang dilakukan oleh Sri Sultan dan seluruh komponen masyarakat Yogyakarta untuk mempertahankan tekadnya itu melalui bentuk-bentuk perlawanan yang bersifat diplomasi maupun perlawanan fisik yang akhirnya terakumulasi di dalam Pertempuran Kota Baru 7 Oktober 1945.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "Latar Belakang dan Akibat dikeluarkannya Amanat 5 September 1945", penulis menempuh langkah-langkah penulisan sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

Penulisan ini memiliki dua ciri yaitu pertama mengandung perspektif historis dan kedua bersifat kualitatif. Oleh karena itu, data yang digunakan harus memenuhi dua kriteria tersebut. Pertama, mengandung perspektif historis berarti data yang digunakan berupa

kumpulan fenomena-fenomena yang dibatasi dalam dimensi ruang dan waktu. Berarti data pada penulisan ini berdasar pada fenomena yang terjadi dalam satu tempat dan dibatasi oleh waktu. Kedua, sifat dari penulisan ini adalah kualitatif sehingga data yang digunakan berupa pernyataan-pernyataan atau tulisan.

Data pada penulisan ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu metode penulisan di mana penulis menggali dan mengolah data yang sudah berbentuk tulisan atau pernyataan menjadi suatu historiografi. Ini berarti menandakan bahwa data yang digunakan sudah ada kemudian tinggal mencari, mempelajari dan memperdalam.

Sumber data pada penulisan ini adalah buku-buku terbitan dalam negeri yang membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang dan akibat dikeluarkannya Amanat 5 September 1945. Pada buku-buku tersebut diharapkan terdapat pernyataan-pernyataan mengenai gejala/peristiwa yang relevan dan sezaman dengan kurun waktu yang telah ditentukan.

Langkah berikutnya adalah kritik sumber. Kritik Sumber merupakan tahap penulisan sejarah setelah pengumpulan data. Kritik bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kredibilitas sumber. Oleh

karena itu dapat dikatakan bahwa kritik adalah pengujian terhadap data pada penulisan sejarah⁷.

Kritik sumber pada penulisan sejarah merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hal ini untuk menghindari adanya kepalsuan dan keberpihakan suatu sumber apalagi data pada penulisan ini sebagian besar merupakan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang merupakan penggunaan sumber lain. Jadi sudah merupakan sumber kedua. Oleh karena itu penulis memperlakukan sumber sedemikian rupa supaya hasilnya mendekati kebenaran.

Salah satu cara yang ditempuh penulis untuk kritik intern adalah membandingkan antar sumber. Bila perbandingan ini kesemuanya kearah metodologi topik yang akan dibahas maka sumber tersebut diakui kredibilitasnya, sedangkan untuk melakukan kritik ekstern sumber tertulis dilakukan dengan meneliti jenis tulisan, gaya bahasanya, setelah itu baru diteliti isinya, apakah isi pernyataan, fakta-fakta dan ceritanya dapat dipercaya, untuk itu perlu pula diidentifikasi penulisnya hal ini mengangkut apakah seorang penulis

⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (terj), UI Press, Jakarta, 1975, hlm. 75

itu sangat berkompeten terhadap masalah-masalah lokal khususnya Yogyakarta.

2. Metode Analisis Data

Data yang telah diseleksi dan diuji kemudian dilanjutkan dengan analisis. Analisis merupakan tahap yang penting dan menentukan dalam suatu penulisan. Jenis analisis ditentukan oleh sifat data yang dikumpulkan. Apabila data yang dikumpulkan itu berwujud kasus-kasus maka analisisnya bersifat kualitatif⁸.

Hasil analisis akan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu penulisan. Penulis berusaha menempatkan data secermat mungkin supaya hasil penulisan ini bisa mendekati keadaan yang sebenarnya. Pengolahan data secara cermat diharapkan mampu mengurangi subjektifitas yang biasanya muncul dalam sebuah historiografi, sebab sejarah dalam arti objektif (peristiwa) yang diamati dan dimasukkan ke pikiran subjek tidak akan pernah murni tapi telah diberi warna sesuai kacamata subjek⁹.

⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 269.

⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, PT Gramedia, Jakarta, 1992, hlm. 62.

Penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I adalah Pendahuluan, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian.

Bab II membahas keadaan politik Yogyakarta dari masa pendudukan Jepang sampai dikeluarkannya Amanat 5 September 1945. Dalam hal ini akan dibahas : Sistem Pemerintahan Jepang di Yogyakarta, Penghapusan Jabatan *Pepatih Dalem* oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Reaksi Rakyat Indonesia terhadap dikeluarkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bab III membahas faktor-faktor politik yang mendorong dikeluarkannya Amanat 5 September 1945. Dalam bab ini akan difokuskan pada faktor politik yaitu :

-Pemikiran-pemikiran politis Sri Sultan Hamengku Buwono IX (anti kolonialisme dan imperialisme).

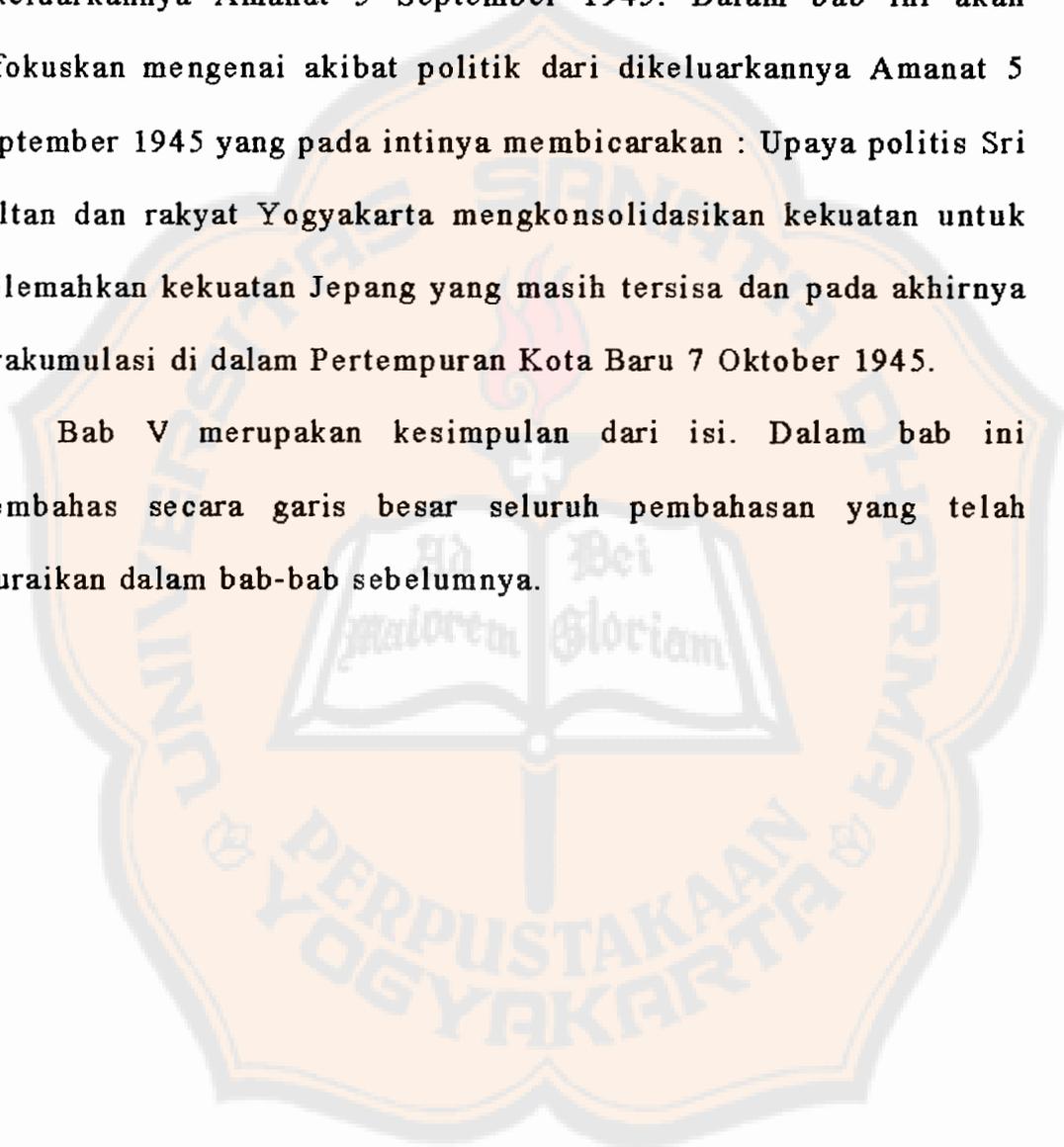
-Tindakan politis Sri Sultan dalam melawan kolonialisme dan imperialisme (Penghapusan Jabatan *Pepatih Dalem*, Dukungan terhadap dikeluarkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia).

-Dukungan rakyat Yogyakarta terhadap langkah-langkah politis yang telah ditempuh Sri Sultan Hamengku Buwono IX (timbangan

balik/respon rakyat Yogyakarta terhadap manuver yang dilakukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX).

Bab IV membahas akibat politik yang ditimbulkan setelah dikeluarkannya Amanat 5 September 1945. Dalam bab ini akan difokuskan mengenai akibat politik dari dikeluarkannya Amanat 5 September 1945 yang pada intinya membicarakan : Upaya politis Sri Sultan dan rakyat Yogyakarta mengkonsolidasikan kekuatan untuk melemahkan kekuatan Jepang yang masih tersisa dan pada akhirnya terakumulasi di dalam Pertempuran Kota Baru 7 Oktober 1945.

Bab V merupakan kesimpulan dari isi. Dalam bab ini membahas secara garis besar seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.



BAB II

**KEADAAN POLITIK YOGYAKARTA DARI MASA
PENDUDUKAN JEPANG SAMPAI DIKELUARKANNYA
AMANAT 5 SEPTEMBER 1945**

A. Sistem Pemerintahan Jepang di Yogyakarta

Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada tentara ekspedisi Jepang di bawah Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942, berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan dengan resmi ditegakkan kekuatan kemaharajaan Jepang. Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu periode pendudukan militer Jepang. Berbeda dengan jaman Hindia Belanda yang hanya terdapat satu pemerintahan sipil, maka pada jaman Jepang terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan yaitu :

1. Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara Kedua Puluh Lima) untuk Sumatra dengan pusatnya di Bukit Tinggi.
2. Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara Keenam Belas) untuk Jawa, Madura dengan pusatnya di Jakarta.

3. Pemerintahan militer Angkatan laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah dengan pusatnya di Sulawesi, Kalimantan dan Maluku¹⁰.

Dengan keberhasilan pendudukan terhadap Indonesia oleh tentara Jepang, maka Jepang mulai mengadakan pemerintahan pendudukan sementara. Hal ini sesuai dengan *Osamu Seirei* (Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenam Belas) No 1 pasal 1 pada 7 Maret 1942. Undang-Undang ini menjadi pokok dari peraturan-peraturan tata negara pada waktu pendudukan. Undang-Undang ini berisi antara lain :

Pasal 1 : Balatentara *Nippon* melangsungkan pemerintahan militer sementara waktu di daerah-daerah yang telah ditempati, agar supaya mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera.

Pasal 2 : Pembesar bala tentara memegang kekuasaan pemerintah militer yang tertinggi dan segala kekuasaan yang dahulu berada di tangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Pasal 3 : Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer.

¹⁰ Nugroho Notokusanto, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 5.

Pasal 4 : Bahwa bala tentara Jepang akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia pada Jepang¹¹.

Dari undang-undang ini dapat diketahui bahwa jabatan Gubernur Jenderal pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu di tangan Gubernur Jenderal diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini pemerintah militer Jepang tetap mempertahankan aparat pemerintahan sipil yang lama beserta pegawainya. Tindakan Jepang itu dimaksudkan agar pemerintahan dapat berjalan terus dan kekacauan dapat dicegah. Susunan pemerintahan militer Jepang terdiri atas : *Gunshireikan* (panglima tentara), kemudian *Saiko Shikikan* (panglima tertinggi), di bawahnya ada *Gunseikan* (kepala pemerintah militer) yang dirangkap oleh kepala staf tentara. *Gunshireikan* menetapkan peraturan yang dikeluarkan oleh *Gunseikan*, namanya *Osamu Kenrei*. Peraturan-peraturan itu diumumkan dalam *Kan Po* (berita pemerintah), sebuah penerbitan resmi yang dikeluarkan oleh *Gunseikanbu* (staf pemerintahan militer pusat). Panglima tentara Keenam Belas di pulau Jawa yang pertama ialah Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Sedangkan Kepala Stafnya adalah Mayor Jenderal

¹¹ *Ibid*, hlm. 6.

Seizaburo Okasaki. Ia bertugas untuk membentuk pemerintahan militer di Jawa dan kemudian diangkat menjadi *Gunseikan*¹².

Pada bulan Agustus 1942 usaha pemerintah militer Jepang meningkat dengan dikeluarkannya undang-undang No :27 (tentang aturan pemerintahan daerah) yang menunjukkan berakhirnya masa pemerintahan sementara. Undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan setelah datangnya tenaga pemerintahan sipil Jepang di pulau Jawa. Mereka mulai dipekerjakan pada badan pemerintah guna melaksanakan reorganisasi Jepang yang hendak menjadikan pulau Jawa sebagai sumber perbekalan perangnya di wilayah selatan¹³.

Menurut undang-undang No: 27 (yaitu undang-undang tentang perubahan tata pemerintahan daerah), Surakarta dan Yogyakarta dijadikan *Kooti* (daerah istimewa). Kedua daerah ini merupakan wilayah kerajaan yang dipertahankan langsung di bawah *Gunseikan* (kepala staf tentara). Di sini dapat dikatakan Jepang menerapkan sistem "*indirect rule*" terhadap kedua daerah ini¹⁴.

¹² *Ibid*, hlm. 10.

¹³ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁴ G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 I*, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hlm. 75.

Khusus mengenai Yogyakarta, setelah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dilantik Jepang menjadi *Yogya-Kooti* maka Jepang mempertegas kembali kekuasaan Sultan dengan memperkenalkan segala hak istimewa yang dahulu dipegang oleh Sultan tetap lestari. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya perintah Bala Tentara *Dai Nippon* yang ditandatangani oleh *Dai Nippon Gunseireikan* Hitoshi Imamura yang berisi sebagai berikut : pasal 1 dan 2 menyatakan pengangkatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi *Koo* (Sultan) oleh *Dai Nippon Gunseireikan* dan suatu perintah untuk mengurus pemerintahan *Kooti* sesuai dengan perintahnya. Pasal 3 menyebutkan wilayah *Kooti* sama dengan wilayah Kasultanan Yogyakarta dulu. Pasal 5 mengatur bahwa *Koo* wajib memerintah *Kooti* untuk memajukan kemakmuran penduduk *Kooti* umumnya. Pasal 4 dan 6 menegaskan bahwa hak istimewa yang dulu dimiliki *Kooti* serta badan-badan pemerintahan yang telah ada di *Kooti* dilestarikan. Pasal 7 menyebutkan bahwa *Gunseireikan* akan membentuk *Kooti Zimu Kyoku* (Kantor Urusan Kasultanan) untuk memimpin dan mengawasi pemerintahan Sultan. Pasal 8 mengisyaratkan bahwa petunjuk lebih lanjut akan dikeluarkan oleh pembesar pemerintah Bala Tentara *Dai Nippon* (*Gunseikan*) atas nama *Dai Nippon Gunseireikan*. Sedangkan petunjuk teknis yang diberikan oleh *Gunseikan* Seizaburo Okasaki menegaskan *Koo*

diangkat atau dipecat oleh *Dai Nippon Gunseireikan*. *Sumotyookan* (Pembesar Urusan Umum/*Pepatih Dalem*) diangkat oleh *Gunseireikan* dari antara pegawai *Koo* dan fungsinya membantu *Koo*¹⁵.

Dari aturan serta petunjuk pelaksanaan dari Jepang jelas lebih memberi kelonggaran kepada Sultan untuk aktif menjalankan pemerintahan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Dalam Perintah Bala Tentara *Dai Nippon*, dwi kesetiaan *Pepatih Dalem* tidak diatur. Berbeda dengan Surat Perjanjian (Kontrak Politik dengan Belanda) dengan tegas mengatur *Pepatih Dalem* dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab baik kepada pemerintah Hindia Belanda maupun kepada Sultan. Dalam Perintah Bala Tentara *Dai Nippon* dinyatakan bahwa kekuasaan menjalankan pemerintahan diserahkan kepada *Koo* dibawah pengawasan pemerintah Jepang (pasal 2 Perintah Bala Tentara *Dai Nippon*). Bahkan pemerintah Jepang memperbolehkan hak istimewa yang dipegang oleh Sultan berjalan terus seperti sedia kala (pasal 4 Perintah Bala Tentara *Dai Nippon*). Dengan demikian pemikiran Sultan untuk menempatkan *Pepatih Dalem* secara penuh di bawah perintahnya pada dasarnya sekarang terwujud.

¹⁵ P.J Soewarno, *op.cit.* , hlm. 99-100.

B. Penghapusan Jabatan Papatih Dalem Oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Sesuai dengan keadaan daerah Yogyakarta yang telah ditetapkan sebagai daerah *Kooti* dan masih diperkenankannya Sultan memegang hak-hak istimewa, berarti Sultan mempunyai kekuasaan yang besar terhadap daerah Yogyakarta. Kekuasaan yang besar itu tertuju pada pelaksanaan pemerintah Kasultanan. Hal ini dapat diartikan bahwa Sultan (*Yogya-Koo*) mempunyai wewenang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan birokrasi yang dimiliki Kasultanan. Maka dengan kekuasaan yang dimilikinya itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memanfaatkan momentum (pendudukan Jepang) itu untuk mewujudkan cita-citanya yaitu melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Usaha yang dilakukan untuk merealisasikan cita-citanya itu ialah penghapusan jabatan *Papatih Dalem* yang telah disebutkan di atas jabatan ini sangat rentan dapat digunakan oleh penjajah untuk alat pengadu domba. Sebelum diuraikan lebih lanjut bagaimana upaya Sultan menghapus jabatan *Papatih Dalem* ini, akan dibahas terlebih dahulu apa sebenarnya *Papatih Dalem* itu.



1. Papatih Dalem

Pada jaman penjajahan Belanda yang menjalankan pemerintah di daerah Kasultanan adalah *Papatih Dalem* dengan persetujuan Gubernur Belanda. *Papatih Dalem* ini mempunyai fungsi ganda, sebab ia adalah pegawai Kasultanan dan pegawai Gubernur Belanda, untuk itu ia mendapat gaji baik dari Gubernur Belanda maupun dari Kasultanan. Bahkan *Papatih Dalem* juga harus mengangkat sumpah setia baik kepada Sri Sultan maupun kepada Gubernur Belanda. Dalam sumpah itu dinyatakan bahwa jika pada suatu saat terjadi pertentangan antara kepentingan Gubernur Belanda dan kepentingan Kasultanan maka *Papatih Dalem* harus memihak kepada penjajah Belanda. Sejarah terjadinya sumpah *Papatih Dalem* seperti itu dimulai dari tahun 1744 pada waktu jaman Kerajaan Mataram beribukota di Kartosuro setelah *Geger Pecina*, karena penjajah Belanda dimintai bantuan oleh Sunan Paku Buwono II untuk menumpas *Geger Pecina* dan ternyata berhasil, maka setelah penumpasan *Geger Pecina* tersebut, penjajah Belanda memperluas kekuasaannya ke dalam Kerajaan Mataram dengan mengadakan perjanjian dengan Sunan Paku Buwono II, bahwa untuk selanjutnya tiap-tiap *Papatih Dalem* harus diangkat oleh Gubernur Belanda atas usul Sri Sunan. Berdasarkan perjanjian tersebut *Papatih Dalem* itu adalah pegawai Gubernur Jenderal Belanda dan pegawai Kasunanan,

mendapatkan gaji dari kedua belah pihak dan harus bersumpah setia baik kepada Gubernur Belanda maupun kepada Sri Sultan dan jika terjadi pertentangan antara Sri Sultan dan Gubernur Belanda, maka *Pepatih Dalem* harus memihak kepada Gubernur Jenderal Belanda¹⁶.

Pada waktu didirikannya Kasultanan Yogyakarta pada tahun 1755 (pada waktu Surakarta di bawah Sri Sunan Paku Buwono III dan Kasultanan Yogyakarta yang beribukota di Gamping dan kemudian pindah ke kota Yogyakarta di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono I), ketentuan mengenai fungsi yang ganda dari *Pepatih Dalem* itu juga diambil alih dalam Politik Kontrak antara Sri Sultan Hamengku Buwono I dengan Gubernur Belanda. Mengingat hal itu dapat dipahami bahwa kedudukan *Pepatih Dalem* sangatlah dilematis, maka seringkali terjadi pertentangan batin antara Sri Sultan dan *Pepatih Dalem* itu, sebab berhubungan dengan fungsinya yang ganda itu, *Pepatih Dalem* dalam prakteknya lebih memberatkan dan lebih memihak kepada Gubernur Belanda, sehingga akibatnya dia pasti berbenturan kepentingan dengan Sri Sultan baik secara terbuka maupun tidak. Bahkan dalam sejarah Kasultanan Yogyakarta pernah terjadi ada *Pepatih Dalem* yang

¹⁶ Soedarisman Poerwoekoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1984, hlm. 7-8.

dibunuh oleh Sri Sultan, sehingga sampai saat ini Papatih Dalem itu terkenal dengan nama *Papatih Dalem Sedo Kedaton*. Bahkan terjadi Sri Sultan mengangkat *Papatih Dalem* tanpa persetujuan Gubernur Belanda, akan tetapi *Papatih Dalem* itu tidak diakui Gubernur Belanda (Patih Djapan). Semua ini terjadi dalam jaman Sri Sultan Hamengku Buwono II¹⁷.

2. Upaya Penghapusan Papatih Dalem Oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Mengingat hal di atas, maka politik Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang dijalankannya pada masa pendudukan Jepang itu adalah sedikit demi sedikit mengurangi peranan dan kekuasaan *Papatih Dalem* itu. Sebab menurut pengalaman yang telah lampau *Papatih Dalem* itu dalam prakteknya menjadi alat penjajah Belanda untuk diadu domba dengan Sri Sultan. Dengan pengalaman ini Sri Sultan hendak mencegah pihak penjajah Jepang dapat mempergunakan *Papatih Dalem* itu sebagai alat untuk diadu domba dengan Sri Sultan. Pada waktu Jepang menyerbu dan menduduki Yogyakarta, *Papatih Dalem* itu diperintah oleh Sri Sultan untuk berkantor di Kraton. Dengan demikian maka pihak penjajah Jepang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8-9.

jika ingin mengadakan hubungan/komunikasi dengan Sri Sultan, tidak perlu melalui *Pepatih Dalem* melainkan penjajah Jepang tersebut harus mengadakan hubungan langsung dengan Sri Sultan sendiri. Oleh karena *Pepatih Dalem* berkantor di Kraton, maka segala kemungkinan bagi penjajah Jepang untuk mengadu domba *Pepatih Dalem* dengan Sri Sultan menjadi diperkecil¹⁸.

Untuk lebih memperkecil peranan dan kekuasaan *Pepatih Dalem* ini, maka Sri Sultan membagi pemerintah Kasultanan dalam jawatan-jawatan yang diberi nama *Paniradya* (pani=tangan, radya=pemerintah atau negara), yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala jawatan yang diberi nama *Paniradyapati* (pati=kepala). Pada permulaannya pemerintah Kasultanan dibagi dalam 6 *paniradya* (jawatan) yaitu :

1. *Paniradya Kapanitran* (Kantor Sekretariat)
2. *Paniradya Ayahan Umum* (Jawatan Urusan Umum)
3. *Paniradya Ekonomi* (Jawatan Perekonomian)
4. *Paniradya Wiyatapraja* (Jawatan PDK)
5. *Paniradya Yayasan Umum* (Jawatan Pekerjaan Umum)
6. *Paniradya Racana-Pencarwara* (Jawatan Urusan Rancangan dan Propaganda)

¹⁸ *Ibid*, hlm. 9.

Kemudian *Paniradya Ayahan Umum* (Jawatan Urusan Umum) dipecah lagi menjadi dua, sehingga dengan demikian dibentuk *Paniradya* lagi yaitu *Paniradya* ketujuh yang diberi nama *Paniradyapati Pariarta* (Jawatan Keuangan) yang juga dikepalai oleh seorang *paniradya* tersendiri. Pada masa lalu segala kekuasaan dan pemerintahan Kasultanan dipusatkan di tangan seorang *Pepatih Dalem* saja, maka sejak dibentuknya *paniradya-paniradya* itu, segala kekuasaan yang berada di tangan *Pepatih Dalem* dibagi di antara *paniradya-paniradya* itu atau jawatan itu. Atau dengan kata lain setelah diangkatnya para kepala jawatan (para *paniradyapati*) itu, maka dalam prakteknya sejak saat itu segala macam kekuasaan yang dahulunya berada ditangan *Pepatih Dalem* menjadi beralih semua ke tangan *Paniradyapati* itu.

Sekalipun secara formal *Pepatih Dalem* itu masih ada , akan tetapi secara riil *Pepatih Dalem* itu sudah tidak memegang kekuasaan sedikitpun, sebab dalam prakteknya segala kekuasaannya sudah berada dan dijalankan oleh para *paniradyapati* itu. Selanjutnya para *paniradyapati* itu dipimpin langsung oleh Sri Sultan, sehingga secara praktis, mereka tidak bertanggungjawab kepada *Pepatih Dalem*, melainkan bertanggungjawab secara langsung kepada Sri Sultan sendiri. Para *Paniradyapati* ini kedudukannya berbeda dengan *Pepatih Dalem* yang mempunyai

fungsi ganda, karena menjadi pegawai berstatus ganda, bergaji ganda dan bersumpah ganda dan menurut sejarahnya *Pepatih Dalem* itu pekerjaannya senantiasa harus melayani Gubernur Belanda¹⁹.

Sehubungan dengan itu maka sulit sekali bagi penjajah Jepang untuk dapat memeralat mereka untuk kepentingan Jepang dan untuk mengadu domba mereka (*paniradyapati*) dengan Sri Sultan. Walaupun secara formal *Pepatih Dalem* itu masih ada dan kedudukannya masih sama dengan dahulu, akan tetapi secara riil dalam prakteknya sudah terjadi pergeseran kekuasaan, sebab dengan politik Sri Sultan ini, maka sebenarnya secara diam-diam kekuasaan *Pepatih Dalem* itu sudah beralih ke tangan Sri Sultan. Pergeseran kekuasaan ini menjadi kenyataan ketika pada 1 Agustus 1945 *Pepatih Dalem* yang terakhir yaitu KPHH Danuredjo dipensiunkan. Setelah *Pepatih Dalem* ini dipensiun maka Sri Sultan tidak mengangkat lagi seorang *Pepatih Dalem* melainkan sejak saat itu Sri Sultan sendirilah yang mengambil alih kekuasaan secara langsung atas daerah Ngayogyakarta Hadiningrat²⁰.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 10.

²⁰ *Ibid*, hlm. 11.

C. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Reaksi Rakyat Yogyakarta Terhadap Dikeluarkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 menyebabkan proses penyerahan Jepang kepada Sekutu. Berita penyerahan Jepang kepada Sekutu ini secara resmi diumumkan oleh Perdana Menteri Suzuki pada 15 Agustus 1945, tetapi peresmian penyerahannya barulah dilakukan pada 2 September 1945 di teluk Tokyo. Dokumen penyerahan itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Sijemitsu atas nama Kaisar dan pemerintah dan oleh Jenderal Umatsu atas nama Kaisar dan markas tertinggi angkatan perang²¹.

Dari bunyi dokumen penyerahan tersebut²², tersirat pula bahwa Indonesia juga harus diserahkan sebagai "inventaris yang utuh dan lengkap" kepada Laksmana Mountbatten dari SEAC (*Southeast Asia Command*) dan kepada Jenderal Blamey dari Australia tetapi di Indonesia sendiri kenyataannya, menurut perintah Jenderal Mac

²¹ Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah DIY, *op.cit.*, hlm. 49.

²² Lihat, *ibid*, hlm. 49-50.

Arthur dari tanggal 15 Agustus sampai 2 September 1945 di Indonesia tidak boleh terjadi penyerahan²³.

Dengan demikian berarti bahwa di Indonesia pada waktu itu terjadi "kevakuman", kesempatan yang amat baik dan berharga itu ternyata tidak disia-siakan begitu saja oleh bangsa Indonesia. Ini terbukti pada 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Bung Karno dan Bung Hatta atas nama Bangsa Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Pidato Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan ke seluruh tanah air hal ini membuktikan bahwa pada detik itu Bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya dan telah bebas dari cengkeraman penjajah²⁴.

Sementara itu di kantor Berita *Domei* terjadi suatu kesibukan yang sangat rahasia dan hati-hati di mana beberapa petugas sedang berusaha agar berita proklamasi itu dapat disiarkan melalui "*Morsecast Domei*". Adanya kerjasama yang baik antara para pemuda yang bermarkas di Menteng 31 dengan beberapa petugas

²³ *Ibid*, hlm. 50.

²⁴ *Ibid*, hlm. 51.

dari kantor berita *Domei*, akhirnya berita proklamasi itu berhasil disiarkan ke seluruh penjuru tanah air dan seluruh dunia²⁵.

Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang berhasil disiarkan melalui kantor berita *Domei* Jakarta itu, ternyata berhasil pula diterima oleh kantor berita *Domei* Yogyakarta, yang pada waktu itu bertempat di Gedung Perpustakaan Negara bagian Atas (jalan Malioboro). Berita Proklamasi itu diterima oleh kantor berita *Domei* cabang Yogyakarta pada 17 Agustus 1945 jam 12.00 siang. Pada mulanya berita proklamasi yang sangat menggembirakan dan sangat penting itu akan segera disiarkan, tetapi tiba-tiba terdengar berita dari *Gunseikanbu* yang melarang disiarkannya berita Proklamasi itu. Namun karena berita Proklamasi itu sudah diterima oleh para wartawan kantor berita *Domei* yang terdiri dari bangsa Indonesia yang berjiwa nasionalis, maka secara sembunyi-sembunyi dari mulut ke mulut akhirnya dapat disebarluaskan. Para wartawan itu kemudian bergerak dan menyebarkan berita Proklamasi itu ke

²⁵ *Ibid*, hlm. 52.

mesjid Besar (dialun-alun utara) dan mesjid Paku Alaman²⁶. Dengan demikian berita proklamasi itu dapat cepat tersebar luas ke seluruh lapisan masyarakat, di kampung-kampung dan di desa-desa. Pada sore hari itu juga Ki Hajar Dewantara mengadakan pawai sepeda keliling kota untuk menyambut Proklamasi kemerdekaan itu²⁷.

Dengan tersiarnya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 18 Agustus segera mengirim kawat ucapan selamat kepada Soekarno dan Mohamad Hatta yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Dilanjutkan pada tanggal 20 Agustus 1945 mengirim kawat ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden atas lahirnya negara Indonesia dan pernyataan siap berdiri di belakang presiden dan wakil presiden²⁸. Untuk mengkoordinasikan setiap kemungkinan gerakan masyarakat yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 19 Agustus 1945 jam 10.00 pagi di Bangsal Kepatihan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengundang kelompok-kelompok pemuda yang terdiri dari kalangan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ P.J Soewarno, *op.cit.*, hlm. 166

²⁸ *Ibid*

agama, kalangan nasionalis, kalangan kepanduan dan kalangan keturunan Tionghoa. Pada pertemuan itu Sri Sultan pada intinya menyatakan bahwa hendaknya kemerdekaan yang telah diraih, dipertahankan dengan menjalin persatuan dan kesatuan di antara mereka. Untuk mengupayakan hal tersebut semua pihak harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing untuk kepentingan bersama-sama ialah menjaga, memelihara dan membela kemerdekaan nusa dan bangsa²⁹.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII dalam mendukung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini akhirnya direspon juga oleh berbagai komponen masyarakat di Yogyakarta. Di antaranya pada tanggal 1 September 1945 dengan persetujuan Sultan, Polisi Istimewa (PI) di bawah pimpinan R.P Soedarsono mengeluarkan maklumat yang menyatakan dirinya sebagai Polisi Republik Indonesia dan akan menghukum keras segala tindakan yang menentang negara Republik Indonesia³⁰.

²⁹ Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah DIY, *op.cit.*, hlm. 54.

³⁰ P.J Soewarno, *op.cit.*, hlm. 166

Sambutan terhadap lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia juga diberikan oleh para pemuda di Yogyakarta, mereka menyadari bahwa Proklamasi Kemerdekaan juga bermakna komando dan merupakan perintah harian untuk melaksanakan pemindahan kekuasaan dari tangan Pemerintah Tentara Jepang kepada Bangsa Indonesia. Para pemuda itu membentuk kelompok-kelompok yang menjurus ke bentuk organisasi yang longgar sampai ke agak ketat. Kelompok dengan organisasi yang agak longgar yaitu : Angkatan Muda Pathook dengan pemimpinnya Kusumo Sunjoyo, Angkatan Muda Jagalan Paku Alaman dengan pemimpinnya Faridan, Angkatan Muda Jetis dengan pemimpinnya Parmadi Joi, Angkatan Muda Gowongan dengan pemimpinnya Wagiyono. Tidak ketinggalan para mantan anggota Peta, Heiho turut pula berpartisipasi mengisi kemerdekaan bergabung dengan kelompok pemuda yang sudah ada dan ada pula yang membentuk kelompok militan³¹.

Kelompok dengan organisasi agak ketat yaitu Gabungan Sekolah Menengah Mataram (Gessem). Kelompok ini dibentuk pada 1 September 1945. Mereka mendukung Proklamasi Kemerdekaan serta komando Presiden Soekarno. Selain itu ada organisasi pemuda

³¹ *Ibid.*

militan yang menamakan dirinya BPU (Badan pengawas Undang-Undang/Barisan penjagaan Umum) di bawah pimpinan Umar Slamet, anggotanya terdiri atas anak-anak sekolah menengah dan stafnya para perwira Peta yang sudah rapat hubungannya satu sama lain pada masa pendudukan Jepang³².

Pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengucapkan pidato radio yang intinya memerintahkan kepada rakyat di daerah-daerah untuk membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Badan Keamanan rakyat (BKR)³³. Perintah ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) di Yogyakarta. Pada permulaan tugasnya sebagai institusi yang mewakili rakyat Yogyakarta, KNID dalam prakteknya merupakan alat badan perjuangan³⁴ dan penggerak dari jalannya revolusi yang nantinya bersama Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII saling bahu-membahu untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Yogyakarta untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Walaupun Yogyakarta terdapat Kasultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman tidak dibentuk dengan dua KNID melainkan hanya satu

³² *Ibid*, hlm. 167.

³³ *Ibid*.

³⁴ Soedarisman Poerwoekoesoemo, *op.cit.*, hlm. 33.

KNID bagi Kasultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman. KNID ini dianggap mewakili rakyat daerah Yogyakarta dan mempunyai tugas formal untuk membantu Sri Sultan dan Sri Paku Alam dalam menjalankan pemerintahan di Yogyakarta. Kecuali dibentuk KNID, sebagai tindak lanjut perintah presiden Soekarno dibentuklah BKR pada tanggal 1 September 1945. BKR Yogyakarta ini beranggotakan mantan-mantan militan bentukan Jepang seperti : Peta, Heiho, di samping itu ada pula komponen yang menamakan diri Barisan Berani Mati, Hisbullah, Sabilillah, Barisan Pelopor, Tentara Rakyat Mataram dan lain sebagainya. Tugasnya menjamin ketentraman dan keamanan rakyat³⁵.

Dengan persatuan yang sudah terjalin ini, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengambil kebijakan untuk mengkonkritkan sikap dan tindakannya dalam menyambut dan mengisi Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu. Maka berdasarkan persetujuan Komite Nasional Indonesia Daerah dikeluarkanlah amanat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada 5 September 1945, amanat tersebut berisi tiga pernyataan :

³⁵ P.J Soewarno, *op.cit.*, hlm. 170.

1. Ngayogyakarta Hadiningrat berbentuk kerajaan yang merupakan Daerah Istimewa, bagian dari Republik Indonesia.
2. Segala kekuasaan dalam negeri dan urusan pemerintahan berada di tangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
3. Hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah Republik Indonesia bersifat langsung dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX bertanggungjawab langsung kepada presiden Republik Indonesia³⁶.

Pada saat yang sama Sri Paku Alam VIII mengeluarkan amanat dengan isi yang sama, kecuali dalam hal subjek pelaku dan kedudukannya. Jadi seluruh isinya sama. Itu pertanda bahwa antara Sri Sultan dan Sri Paku Alam mempunyai kehendak yang sama³⁷.

Demikian pernyataan itu yang disambut secara positif oleh pemerintah pusat. Keesokan harinya pada tanggal 6 September 1945 utusan dari pemerintah pusat yaitu menteri negara Mr Sartono dan Mr A.A Maramis datang di Yogyakarta untuk menyampaikan Piagam Penetapan mengenai kedudukan Yogyakarta dalam lingkungan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Piagam ini sebenarnya sudah agak lama disiapkan di Jakarta,

³⁶ Atmakusumah (perry), *op.cit.*, hlm. 64-65.

³⁷ G.Moedjanto, *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm. 69.

tertanggal 19 Agustus 1945 atau berarti sehari setelah dikirimkan kawat ucapan selamat yang pertama dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX kepada Soekarno-Hatta. Piagam tersebut sesungguhnya adalah tanda kepercayaan Republik Indonesia kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan satu keputusan tepat karena ketika Republik Indonesia yang sedang bergejolak ini menghadapi berbagai ancaman dari musuh, Sri Sultan menampilkan diri sebagai pendukung dan penyelamat yang tangguh bagi masyarakat Yogyakarta³⁸.

³⁸ Atmakusumah (perny), *op.cit.*, hlm. 65.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR POLITIK YANG MENDORONG DIKELUARKANNYA AMANAT 5 SEPTEMBER 1945

Dalam membahas faktor-faktor yang mendorong dikeluarkannya Amanat 5 September 1945 ini, akan dibahas mengenai hal ditinjau dari aspek politik.

A Pemikiran Politis Sri Sultan Hamengku. Buwono IX (Dalam Kerangka Mewujudkan Ide Anti Kolonialisme dan Imperialisme)

Pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono IX mulai muncul ketika ia mendapat kepastian dari ayahnya bahwa dialah calon Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sesudah ia terpilih menjadi raja menggantikan ayahandanya tersebut ia berusaha untuk tidak semata-mata menjadi obyek yang harus tunduk pada kemauan Belanda. Ia justru berusaha menawar ketentuan-ketentuan dalam kontrak politik yang harus ia tandatangani³⁹

Sesudah kontrak politik ia tandatangani, ia dinobatkan oleh Gubernur Jenderal Lucien Adam menjadi raja Yogyakarta pada 18 Maret 1940. Dalam pidato penobatannya itu ada dua hal penting yang memperlihatkan paham kebangsaannya. Pertama, adalah kalimat yang berbunyi : “Walaupun saya telah mengenyam

³⁹ G. Moedjanto, *op.cit.* , hlm. 71.

pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap orang Jawa”. Kedua, adalah ucapannya yang berisi janji perjuangan : “Izinkanlah saya mengakhiri pidato saya ini dengan berjanji, semoga saya dapat bekerja untuk memenuhi kepentingan nusa dan bangsa, sebatas pengetahuan dan kemampuan yang ada pada saya”⁴⁰.

Kata-kata yang diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX ini secara tersirat memiliki suatu makna yang menekankan aspek kebangsaan yang kuat. Walaupun Republik Indonesia pada saat itu belumlah terbentuk, Sri Sultan sebenarnya hendak menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang nasionalis yang sangat mendambakan munculnya suatu negara yang berdaulat, merdeka terlepas dari belenggu penjajahan. Tampaklah apa yang diungkapkan Sri Sultan menunjukkan suatu pernyataan yang progresif yang tidak lazim pada masanya itu. Dalam kutipan pertama terlihat bahwa ia memperlihatkan teguhnya kepribadian, ia tidak kehilangan identitas karena menikmati pendidikan yang sebenarnya⁴¹. Kutipan kedua mengandung makna tekad perjuangannya untuk nusa dan bangsa. Meskipun Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyebut diri orang Jawa walaupun ia tidak menyebutkan nusa dan bangsa Indonesia, tetapi sulitlah kiranya

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

untuk mengartikan bahwa nasionalisme Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah nasionalisme sempit, nasionalisme kedaerahan Jawa. Apalagi sejarah kemudian menunjukkan bahwa kejawaannya adalah dalam rangka keindonesiaan : ia adalah orang Jawa berkebangsaan Indonesia⁴². Termasuk dalam hal ini paham kebangsaannya ia tunjukkan melalui dukungannya terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan dikonkritkan lagi melalui Amanat 5 September 1945 bersama-sama dengan Sri Paku Alam VIII.

Dalam kaitannya dengan ide kebangsaan Sri Sultan ini, ada berbagai faktor yang mendasari mengapa ia bertekad untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang diwujudkan dalam ide kebangsaannya itu antara lain ⁴³:

1. Adanya rasa malu. Dikatakan bahwa sebagian besar cendekiawan dan tokoh politik pada masa itu menganggap raja-raja seperti Sunan, Sultan, Mangku Negara dan Paku Alam sebagai kaki tangan Jepang. Anggapan ini mempengaruhi dirinya untuk berbuat segala sesuatu sedemikian rupa, sehingga dirinya tidak digolongkan sebagai kaki

⁴² *Ibid*, hlm. 72

⁴³ Ceramah Sultan HB IX di Taman Hiburan Rakyat Yogyakarta, 18 Agustus 1986 (dalam P.J Soewarno, *op.cit.* , hlm. 84.

tangan Belanda atau Jepang. Tekad ini mulai diwujudkan sejak ayahnya meninggal dunia dan ia akan menggantikannya. Perdebatan sengit dengan Gubernur Jenderal Belanda Lucien Adam termasuk dalam hal ini masalah jabatan *Pepatih Dalem* menunjukkan tekadnya itu. Sri Sultan mempunyai tekad kuat untuk membuktikan bahwa dirinya tidak kalah maju dengan para cendekiawan dan tokoh-tokoh politik yang ada masa itu.

2. Contoh yang diberikan oleh nenek moyangnya seperti Sultan Agung, Sri Sultan Hamengku Buwono I dan Pangeran Diponegoro. Dia sangat terkesan atas usaha Sultan Agung mengusir Belanda dari Batavia. Dia meyakini kebenaran serbuan Sultan Agung ke Batavia abad XVII itu berdasarkan bukti-bukti yang masih dapat diketemukannya. Dia mengemukakan beberapa contoh bukti seperti nama *Matraman* di Jakarta, *Bekasi* dari kata *Bekasasi* yaitu bukan purnama, menurut keyakinannya adalah tempat markas dua bupati yang dikirim oleh Sultan Agung. Dengan menunjuk hal-hal itu Sultan akan membuktikan bahwa keyakinannya terhadap penyerbuan Sultan Agung ke Batavia itu tidak hanya diterima dari babad ataupun cerita turun-temurun, tetapi didukung oleh bukti-bukti nyata yang rasional. Berdasarkan bukti-bukti itu Sri Sultan Hamengku Buwono IX meneladani perjuangan Sultan Agung dengan tidak ragu-ragu. Melalui keteladanan Sultan Agung, Sri Sultan Hamengku Buwono IX berupaya membentuk wawasan terintegrasi dalam

kerangka/landasan baginya untuk berjuang melawan pihak penjajah. Persatuan inilah yang merupakan kunci/modal dasar baginya untuk mewujudkan cita-citanya melawan kaum penjajah. Persatuan yang dimaksud adalah upaya Sri Sultan untuk mengintegrasikan berbagai komponen masyarakat Yogyakarta untuk melawan upaya kaum penjajah yang selalu menindas hak-hak rakyat. Realisasi dari idenya ini pada akhirnya terwujud dalam Amanat 5 September 1945. Amanat ini membuktikan bahwa sebenarnya sudah terjadi apa yang dinamakan "*jumbuhing kawula lan gusti*" (persatuan antara raja dan rakyatnya) merupakan modal dasar untuk membangun secara bersama-sama dasar terjalannya suatu hubungan kedua belah pihak baik bagi raja dan rakyat untuk saling memiliki, saling menjaga "*tata tentreming praja*" (ketentraman kerajaan). Inilah sebenarnya ide kebangsaan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Keteladanan Sri Sultan Hamengku Buwono I yang berkesan bagi Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah keberaniannya menentang tindakan Belanda yang sewenang-wenang mengambil tanah yang sudah menjadi hak miliknya ketika masih menjadi Pangeran Mangkubumi. Dia juga mengagumi Pangeran Mangkubumi sebagai ahli strategi militer, komandan yang ulung, dan sebagai diplomat yang tangguh. Dengan diplomasinya dia memperoleh daerah Yogyakarta yang meliputi Banyumas, Kedu, Yogyakarta dan Madiun. Keahlian dalam berdiplomasi inilah yang ia terapkan dalam

perundingan dengan Gubernur Jenderal Lucien Adam termasuk di dalamnya mengenai permasalahan *Pepatih Dalem*. Kemampuannya itu memang benar-benar teruji dengan begitu lamanya jangka waktu perundingan itu sampai pada akhirnya ia harus menandatangani kontrak politik itu. Dengan catatan apa yang dilakukannya itu bukanlah didasarkan bahwa ia takut atau menyerah pada pihak penjajah tetapi dikarenakan pertimbangan mistik tradisional yang diduganya berasal dari Sultan Agung yang ia teladani itu.

Keteladanan yang terakhir adalah perjuangan Pangeran Diponegoro walaupun dari perlawanan itu berakibat hilangnya Kedu, sehingga Yogyakarta menjadi seperti sekarang ini. Dia mengakui dan merasakan bahwa perjuangan nenek moyangnya mempunyai dampak yang mendalam di dalam jiwanya.

Dia menyimpulkan bagaimanapun juga setiap Sultan itu berjuang dan dia tahu bahwa dalam angan-angannya selalu terbayang Mataram. Dikatakan dalam hal ini sampai kepada ayahnya Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, baginya kebesaran Mataram masih menjadi idaman. Sultan menyebutnya sebagai bukti ayahnya memiliki suatu tempat peristirahatan di Kaliurang yang diberi nama *Ngeksi Ganda* (*ngeksi*=melihat, *ganda*=bau). Orang melihat dengan mata dan membau sesuatu yang harum, kalau digabung menjadi mataharum, kemudian menjadi *mataram*. Jadi *Ngeksi Ganda* maksudnya *Mataram*. Tindakan dari idaman nenek moyang itu

diakui juga mempunyai dampak yang dalam pula pada jiwanya. Di sini tampak Sri Sultan Hamengku Buwono IX mulai menunjukkan secara tersirat suatu kekuatan dari adanya persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan akan mustahil Mataram mengalami kejayaannya. Maka dari itu dalam faktanya nanti Sri Sultan Hamengku Buwono IX selalu mengikutsertakan komponen-komponen masyarakat Yogyakarta untuk bersama-sama memberantas segala hal yang berbau imperialisme dan kolonialisme. Dengan tujuan akhir secara bersama-sama pula mewujudkan ketentraman dan keamanan Yogyakarta.

3. Faktor yang terakhir adalah faktor apa yang disebutnya sebagai pembangkit rasa nasionalisme dengan solidaritas khusus kepada rakyat kecil yang tertindas. Sultan mengatakan bahwa pendidikan yang dijalannya pada masa kanak-kanak di tengah-tengah keluarga Belanda memberi pengalaman yang berharga baginya. Dalam keluarga Belanda itu dia sering melihat pembantu rumah tangganya yang bersuku Jawa dimaki-maki oleh keluarga Belanda, kalau dia melakukan kesalahan. Fenomena ini diakuinya kelak akan menimbulkan pada dirinya suatu semangat nasionalisme yang teguh.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tekad Sultan untuk melepaskan diri dari penjajahan itu didorong oleh⁴⁴ :

⁴⁴P.J Soewarno, *op.cit.* , hlm. 87.

1. Usaha untuk menghilangkan *image* bahwa Sultan itu selalu menjadi kaki tangan penjajah.
2. Usaha untuk melanjutkan perjuangan nenek moyangnya mengusir Belanda demi rakyat kecil agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dan demi keagungan Mataram yang diduga selalu memenuhi angan-angan pendahulunya.
3. Semangat nasionalisme yang ditumbuhkan oleh solidaritasnya terhadap pelayan Jawa yang dimaki-maki oleh keluarga Belanda.

B. Tindakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX Dalam Melawan Kolonialisme dan Imperialisme

Dalam mewujudkan ide anti kolonialisme dan imperilaisme, Sri Sultan Hamengku Buwono IX melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Penghapusan Jabatan *Pepatih Dalem*

Sri Sultan menyadari sekali dengan adanya jabatan *Pepatih Dalem*, sebenarnya pihak penjajah hanya melanjutkan sistem adu dombanya. Sistem ini dipergunakan oleh penjajah jika ia tidak mampu mengatasi sendiri apa yang terjadi di lingkup intern Kraton, maka penjajah akan mempergunakan jabatan *Pepatih Dalem* untuk mempengaruhi Sri Sultan agar mau berpijak kepada penjajah. Atau dengan kata lain penjajah dalam hal ini pemerintah Belanda hendak menciptakan sistem dualisme dalam pemerintahan Kasultanan.

Sehingga apabila sewaktu-waktu eksistensi Belanda terancam, maka ia tinggal mengontrol jabatan *Pepatih Dalem* untuk diadu domba dengan Sri Sultan, akibatnya situasi kacau. Dalam situasi kacau seperti inilah yang sangat diharapkan Belanda karena dengan taktik ini Belanda seolah-olah tampil sebagai “penolong” untuk meredakan kekacauan tersebut dan pada akhirnya kembali memegang kendali kekuasaan.

Kesadaran inilah yang menggugah Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk melakukan antisipasi sedini mungkin menghapuskan jabatan *Pepatih Dalem* pada masa pendudukan Jepang. Dengan kemampuannya melihat situasi dan kondisi pada masa pendudukan Jepang, Sri Sultan sedikit demi sedikit mulai meralisasikan penghapusan jabatan *Pepatih Dalem* tersebut. Adapun yang menyebabkan Sri Sultan mengambil kebijakan tersebut adalah

a) Peraturan Pemerintahan Bala Tentara Jepang

Di dalam peraturan pemerintahan Bala Tentara Jepang tidak disebutkan secara eksplisit peranan dan status *Pepatih Dalem* seperti halnya pada masa pemerintahan Belanda. Berbeda dengan surat perjanjian (kontrak politik dengan Belanda) dengan tegas mengatur *Pepatih Dalem* dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab baik kepada pemerintah Hindia Belanda maupun kepada Sultan. Dalam perintah Bala Tentara Jepang hanya dinyatakan bahwa kekuasaan menjalankan pemerintahan diserahkan



kepada *Koo* di bawah pengawasan pemerintah Jepang. Bahkan pemerintah Jepang memperbolehkan hak istimewa yang dipegang oleh Sultan berjalan seperti sedia kala. Diperkuat lagi petunjuk *Gunseikan* yang hanya menegaskan *Sumotyookan* (*Pepatih Dalem*) diadakan untuk membantu Sultan dan dalam menjalankan perintahnya, dia harus bekerjasama dengan *Kooti Zimu Tyookan* (*Pembesar Kantor Urusan Kasultanan*).

b) Status Yogyakarta Dijadikan *Kooti* (Daerah Istimewa)

Dengan adanya status keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah Jepang bagi daerah Yogyakarta mempunyai arti pula dipertahankannya Yogyakarta sebagai wilayah yang didasarkan landasan historis yaitu berupa kerajaan. Sebagai sebuah kerajaan pemerintahannya diperintah oleh seorang raja. Melihat kondisi itu setelah Sri Sultan Hamengku Buwono IX dilantik menjadi *Yogya Kooti* (kepala daerah Yogyakarta) maka Jepang mempertegas kembali kekuasaan Sultan dengan memperkenalkan segala hak istimewa yang dahulu dipegang oleh Sultan tetap lestari.

Melihat berbagai hal di atas, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mempunyai kekuasaan yang besar terhadap daerah Yogyakarta. Kekuasaan itu tertuju pada pelaksanaan perintah Kasultanan. Hal ini dapat diartikan bahwa Sultan (*Yogya-Koo*) mempunyai wewenang kekuasaan untuk menjalankan sesuai dengan birokrasi yang dimiliki Kasultanan. Maka dengan kekuasaan yang dimilikinya itu, Sri

Sultan Hamengku Buwono IX memanfaatkan kesempatan itu untuk mewujudkan ide anti imperialisme dan kolonialisme.

Dengan demikian pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk menempatkan *Pepatih Dalem* penuh di bawah pemerintahnya pada dasarnya sudah terwujud. Meskipun Sultan tetap diawasi oleh pemerintah Jepang, tetapi secara yuridis *Pepatih Dalem* tidak dimungkinkan untuk dipergunakan sebagai alat pengadu domba sebab pemerintah Jepang tidak mengatur pertanggungjawaban *Pepatih Dalem* secara rinci.

Manuver yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan menghapuskan jabatan *Pepatih Dalem* mempunyai implikasi tidak hanya berhasil mematahkan politik penjajah yang mempergunakan *Pepatih Dalem* sebagai alat untuk mengabdikan kepada kepentingan penjajah dan untuk diadu domba dengan Sri Sultan, tetapi dengan menghapuskan fungsi *Pepatih Dalem* atau dengan mengambil alih fungsi *Pepatih Dalem* ditangan Sri Sultan sendiri dapat diartikan merupakan suatu langkah politik yang tepat untuk menghadapi saat yang bersejarah yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan revolusi yang meletus serta kemudian berkobar sebagai akibat dari Proklamasi Kemerdekaan itu⁴⁵.

⁴⁵ Soedarisman Poerwoekoesoemo, *op.cit.*, hlm. 11-12.

2. Dukungan Terhadap Dikeluarkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta merupakan awal mula munculnya sebuah kekuatan raksasa yang hendak meruntuhkan nasib penderitaan yang diakibatkan oleh pihak penjajah yang selalu menindas hak-hak rakyat Indonesia dan merampas segala sumber daya alam di tanah air Indonesia. Konsekuensi dengan dinyatakannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah rakyat Indonesia saling bahu-membahu, senasib sepenanggungan menumpas segala ancaman dari luar maupun dari dalam yang selalu siap mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan yang sudah terjalin itu. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu maka bangsa Indonesia berhak menyusun suatu negara dan masyarakat sendiri yang sesuai dengan karakter/budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia atau dengan kata lain pernyataan Kemerdekaan Indonesia mewakili suara rakyat Indonesia kepada dunia bahwa Bangsa Indonesia telah siap untuk menegakkan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Pilihan untuk mencapai sebuah kemerdekaan dikarenakan situasi pada saat itu memungkinkan Belanda untuk datang kembali menjajah bangsa Indonesia, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali memilih jalan revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Bangsa Indonesia menyadari dengan Proklamasi Kemerdekaan itu tujuannya

satu yaitu menguburkan kolonialisme yang sudah berabad-abad merajalela di bumi Indonesia⁴⁶.

Kesamaan visi Proklamasi Kemerdekaan dengan ide anti kolonialisme dan imperialisme inilah yang menyebabkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ikut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia khususnya wilayah Yogyakarta. Sebagai bukti atas dukungannya tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada 18 Agustus 1945 segera mengirim kawat ucapan selamat kepada Soekarno dan Mohammad Hatta yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Dilanjutkan pada 20 Agustus 1945 mengirim kawat ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden atas lahirnya negara Indonesia dan pernyataan siap berdiri di belakang presiden dan wakil presiden. Untuk memperkokoh kekuatan tegaknya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini, Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada 19 Agustus 1945 menghimpun kelompok-kelompok pemuda dari segala golongan untuk menjalin persatuan dan kesatuan.

C. Dukungan Rakyat Yogyakarta Terhadap Langkah-Langkah yang telah Ditempuh Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Semangat dan kesadaran dari adanya kemerdekaan yang telah dicapai ini, memunculkan suatu kekuatan revolusioner di

⁴⁶ Soetrisno Kutoyo, *Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, Mutiara Sumber Wijaya, Jakarta, 1996, hlm. 121.

Yogyakarta. Dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan ini, rakyat Yogyakarta merasa puas, karena dalam keadaan yang sangat genting itu rakyat sewaktu-waktu dapat berhubungan langsung dengan Sri Sultan tanpa melalui *Pepatih Dalem*. *Pepatih Dalem* di mata rakyat sudah dikenal sebagai alat penjajah Belanda, sehingga rakyat sudah tidak menaruh kepercayaan lagi kepada *Pepatih Dalem* tersebut.

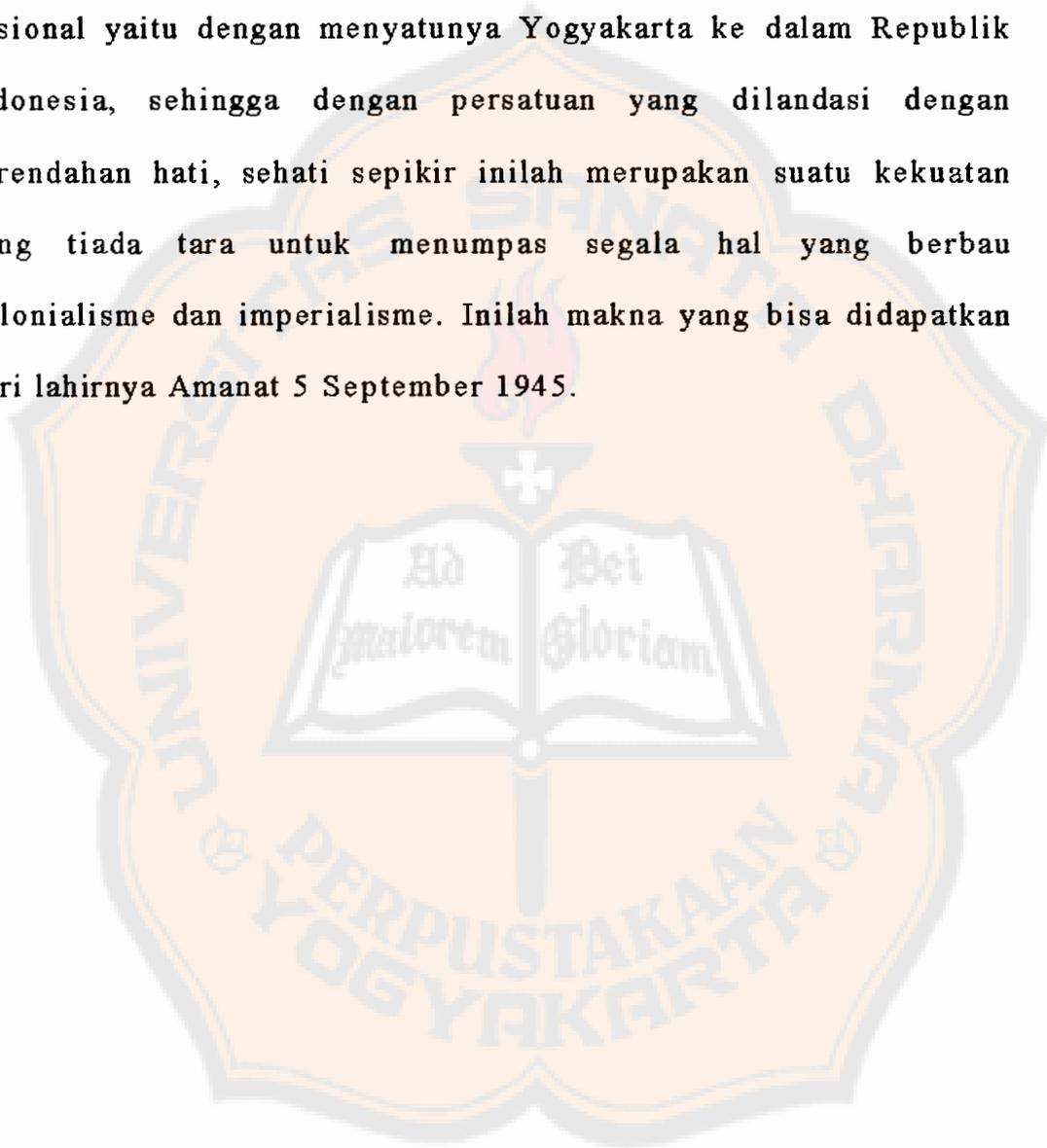
Dalam revolusi yang dasyat di mana segala sentimen ditumpahkan untuk menumbangkan penjajah, maka rakyat hanya akan dapat dikendalikan oleh tokoh atau pemimpin yang mereka percayai. Keadaan ini secara psikologis sangat menguntungkan sekali bagi rakyat Yogyakarta, sebab yang memimpin pemerintahan secara langsung adalah Sri Sultan sendiri dan rakyat menaruh kepercayaan kepada Sri Sultan, sebab Sri Sultan dikenal oleh rakyat sebagai seorang tokoh yang senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya. Dalam situasi di mana Sri Sultan sendiri yang memimpin daerahnya secara langsung dan rakyat menaruh kepercayaan kepada Sri Sultan itu, maka sekalipun revolusi berkobar dengan dasyatnya di Yogyakarta, revolusi ini dapat menemukan salurannya secara wajar, sehingga dapat menyelamatkan kedudukan Kasultanan yang menjelma bersama-sama daerah Paku Alaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta⁴⁷.

⁴⁷ Soedarisman Poerwoekoesoemo, *op.cit.*, hlm. 12-13.

Kepercayaan yang diberikan rakyat kepada Sri Sultan inilah menyebabkan adanya dukungan dari berbagai lapisan masyarakat Yogyakarta. Dukungan-dukungan itu antara lain berasal dari : Kesatuan Polisi di bawah pimpinan R.P Soedarsono, sambutan/dukungan juga diberikan oleh para pemuda seperti Angkatan Muda Pathook, Angkatan Muda Jagalan Paku Alaman, Angkatan Muda Jetis, Angkatan Muda Gowongan, tidak ketinggalan para mantan anggota Peta, Heiho turut pula berpartisipasi mengisi kemerdekaan.

Jadi dapat dikatakan di sini bahwa dengan terjalinnya persatuan dan kesatuan dua komponen yaitu raja dan rakyat Yogyakarta sesungguhnya sudah terjadi "*jumbuhing kawula lan gusti*" (persatuan antara raja dan rakyat). Persatuan yang selama masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang masih dalam angan-angan, sekarang pada dasarnya sudah terwujud. Inilah yang merupakan cita-cita dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX baik itu untuk mewujudkan ide-idenya yang anti kolonialisme dan imperialisme maupun sebagai pewaris tahta kerajaan Mataram. Perlu ditambahkan di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, hendak menunjukkan sebenarnya tidak ada dualisme kepemimpinan antara Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Republik Indonesia. Dengan dukungannya terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan pernyataan siap

berdiri di belakang Republik Indonesia membuktikan pula pentingnya "*jumbuhing kawula lan gusti*" tidak hanya diterapkan dalam kerangka lokal (Yogyakarta) tetapi juga dalam lingkup nasional yaitu dengan menyatunya Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia, sehingga dengan persatuan yang dilandasi dengan kerendahan hati, sehati sepikir inilah merupakan suatu kekuatan yang tiada tara untuk menumpas segala hal yang berbau kolonialisme dan imperialisme. Inilah makna yang bisa didapatkan dari lahirnya Amanat 5 September 1945.



BAB IV

AKIBAT POLITIK DIKELUARKANNYA AMANAT 5

SEPTEMBER 1945

A. Upaya Politis Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Masyarakat Yogyakarta Mengkonsolidasikan Kekuatan

Konsekuensi dengan dikeluarkannya Amanat 5 September 1945, menyebabkan baik Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan seluruh komponen masyarakat Yogyakarta memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan tekadnya itu. Mengingat bahwa Jepang masih menduduki wilayah-wilayah yang strategis di Yogyakarta seperti di Pingit, Kotabaru, dan Maguwo maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya Amanat 5 September 1945 itu merupakan suatu pernyataan yang berani dan mengandung resiko yang tinggi⁴⁸. Tetapi oleh karena begitu besarnya tekad yang menyala untuk terlepas dari belenggu penjajahan maka apapun resikonya hal ini tetap dijalani baik oleh Sri Sultan maupun seluruh komponen masyarakat Yogyakarta.

Maka untuk mempertahankan tekadnya itu, Sri Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi segera melakukan konsolidasi

⁴⁸ P.J Soewarno, *Yogyakarta Di Awal Revolusi Kemerdekaan*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 1994, hlm. 35.

kekuatan politik. Upaya yang dilakukannya antara lain meningkatkan hubungan formal dengan KNID⁴⁹. Selain itu Sultan selalu berusaha membersihkan birokrat-birokratnya dari jiwa penjajahan yang ditinggalkan oleh Belanda dan Jepang. Dengan nasihat-nasihat yang disebarluaskan lewat *wara-wara*, Sultan menghendaki perubahan total dalam semangat dan jiwa pegawai pangreh praja sesuai dengan kemerdekaan yang sedang ditegakkan waktu itu, sehingga mereka dapat menyesuaikan dirinya dengan semangat rakyat yang sedang bergerak. Nasihat-nasihat itu dituangkan dalam tulisan berjudul "*Kautaman Niti Priksa Garbane Dhewe*" (Keutamaan Mawas Diri) yang berisi tentang arti kemerdekaan, berani mengakui kesalahan pribadi, menjunjung tinggi kepentingan masyarakat berdasarkan semboyan "*Sayuk Rukun, Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe*" (Rukun, bekerja keras tanpa pamrih). Bagi mereka yang tidak mau menyesali kesalahannya Sultan mengancam dengan pemecatan. Untuk maju Sultan selalu menegaskan orang harus berani, jujur, adil, tahu kewajiban, dan berpikiran sehat⁵⁰.

⁴⁹ P.J Soewarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm. 171.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 172.

Selain itu melalui restu dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, komponen-komponen masyarakat yang sudah mendukung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia seperti Polisi Istimewa (PI), BKR, BPU dan kelompok-kelompok pemuda lainnya mendapat akomodasi yang sah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan Sultan dengan seluruh komponen masyarakat semakin baik. Hal ini disebabkan adanya kesamaan aspirasi yaitu tekad untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain dan memindahkan kekuasaan kepada bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, juga karena rakyat mengakui kedudukan Sultan sebagai puncak kekuasaan berdasarkan keturunan di Yogyakarta kecuali itu, keteguhan Sultan memegang kendali pimpinan dalam masa revolusi menimbulkan keyakinan kepada rakyat Yogyakarta bahwa Sultan memiliki kharisma yang memberinya kekuatan supra natural dalam menghadapi masa-masa genting. Dengan demikian kekuasaan Sultan dapat diterima oleh semua golongan masyarakat di Yogyakarta⁵¹.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 173.

B. Kekuatan Rakyat Yogyakarta versus Kekuatan Jepang

Terbentuknya kekuatan pribumi yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX menimbulkan situasi menjadi tegang. Hal ini wajar oleh karena di dalam satu wilayah terdapat dua kekuatan besar yaitu kekuatan pribumi melawan kekuatan penjajah dalam hal ini tentara Jepang. Di satu pihak sikap kaum pribumi mempunyai misi untuk segera mengusir penjajah yang telah lama menginjak-injak hak-hak rakyat dan tanah airnya, di lain pihak yaitu pihak penjajah ingin mempertahankan kondisi *status quo* di Yogyakarta yang juga telah diklaim menjadi wilayahnya. Maka dalam bulan September dan Oktober 1945 keadaan menjadi tegang oleh karena *Kooti Zimu Tyookan* beserta tentaranya masih memegang senjata lengkap.

Dalam keadaan yang tegang ini kelompok-kelompok rakyat yang telah diuraikan di atas bertindak untuk mewujudkan kemerdekaan itu dengan mengadakan gerakan-gerakan. Gerakan itu berupa perampasan senjata dan mobil milik Jepang baik dengan jalan penyerobotan seperti yang dilakukan Angkatan Muda Gowongan dan Angkatan Muda Pathook, maupun dengan perundingan untuk mendesak pimpinan Jepang agar menyerah secara damai. Hal ini dilakukan Angkatan Muda Pathook dengan mencegat rombongan Nakamura di jalan Ngabean, dan dengan sopan mempersilahkan singgah di Hotel Tugu untuk berunding. Mereka menyerukan kepada Nakamura untuk segera memerintahkan Jepang untuk menyerah,

dengan resiko apabila ia tidak mengindahkan seruannya ini maka konsekuensinya ia akan menghadapi kemarahan rakyat Yogyakarta yang siap bertempur habis-habisan. Mendapat ancaman seperti itu tidak bisa lain akhirnya Nakamura segera mengeluarkan perintah harian agar tentaranya menyerahkan senjata⁵². Selain itu Angkatan Muda Pathook merebut dua belas pucuk senjata api dari penjaga Kantor Pos Besar Yogyakarta⁵³.

Kelompok-kelompok pemuda itu juga memantapkan masyarakat dengan menyebarkan simbol-simbol kemerdekaan di tengah-tengah masyarakat seperti pekik kemerdekaan, pemasangan lencana merah putih oleh pemuda-pemuda pada dada setiap orang yang lewat di jalan-jalan umum, menurunkan bendera Jepang dan mengibarkan bendera merah putih di markas tentara Jepang di Kota Baru dan menurunkan bendera Belanda serta mengibarkan bendera merah putih di Hotel Tugu⁵⁴. Dalam upaya masyarakat melemahkan kekuatan Jepang terdapat peristiwa penting pada situasi tegang saat itu antara lain :

⁵² *Ibid*, hlm. 174.

⁵³ P.J Soewarno, *Yogyakarta Di Awal Revolusi Kemerdekaan*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 1994, hlm. 43.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 45

1. Pengibaran Bendera Merah Putih pada 21 September 1945⁵⁵.

Usaha memasyarakatkan simbol kemerdekaan yang paling berhasil adalah penurunan bendera Jepang dan pengibaran bendera merah putih di tempat kediaman *Kooti Zimu Kyoku Tyookan* (Gubernur Militer Jepang) yang biasa disebut *Tyookan Kantai* (Gedung Agung sekarang) pada 21 September 1945. Peristiwa itu bermula dari ulah tentara Jepang yang menurunkan bendera merah putih dan merobek-robeknya. Akibat ulah tentara Jepang ini menimbulkan kemarahan para pemuda yang lewat di muka gedung itu. Namun oleh karena kemampuan diplomasi Sri Sultan yang mendengar keributan para pemuda itu, segera menenangkan massa yang bergejolak emosinya itu. Sri Sultan pulalah yang akhirnya meminta kepada pihak Jepang di Gedung Agung itu untuk segera mengibarkan bendera Republik Indonesia seperti semula, sebab melihat gelagatnya kalau bendera Republik Indonesia tidak boleh dikibarkan akan terjadi apa-apa yang tidak diinginkan oleh Jepang. Sekali lagi tampilkan gaya kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang selalu berusaha merangkul semua pihak agar tidak terjadi pertumpahan darah, menunjukkan suatu itikad baik terhadap pengabdian kepada masyarakat Yogyakarta.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 45-48

Meskipun peristiwa pengibaran bendera merah putih bermula dari gerakan spontan tetapi tidak terlepas dari koordinasi Polisi Istimewa. Sesudah peristiwa bendera di Gedung Agung satu kompi PI mengawal massa yang berdemonstrasi menuju ke utara, pada saat itu mereka dihadang tentara Jepang dengan sangkur terhunus. Melihat kondisi tersebut, salah satu anggota PI menerangkan kepada tentara Jepang bahwa pasukan itu adalah polisi yang menjaga keamanan. Dengan demikian pertumpahan darah dapat dihindarkan.

2. Penolakan PI terhadap Perlucutan Senjata pada 22 September 1945⁵⁶

Keterlibatan PI dalam pengibaran bendera merah putih itu menyebabkan Kepala Polisi Jepang dari *Kooti Zimu Kyooku* mendatangi asrama PI di Gayam dengan tujuan untuk melucuti persenjataan PI. Alasan Jepang mengadakan pelucutan senjata terhadap PI adalah untuk melaksanakan Maklumat *Saiko Sikikan* tentang larangan bersenjata dan dia memerintahkan PI mengumumkan maklumat itu kepada masyarakat. Setelah ada amanat itu, Oni Sastroatmodjo (kepala PI) tidak mengumumkan maklumat *Saiko Sikikan* kepada masyarakat tetapi sebaliknya dia menghubungi masyarakat terutama mantan Peta, Heiho dan para pemuda. Bahkan

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 50.

Kepala PI tersebut mempertahankan senjata anak buahnya yang berjumlah 180 buah dan mengatakan bahwa dalam keadaan apapun polisi harus bersenjata. Koordinasi yang dilakukan dengan menghubungi mantan Peta, Heiho itu dilandasi oleh gelagat Jepang yang rupa-rupanya akan mengadakan perlucutan senjata secara paksa. Maka untuk mengantisipasi segala hal yang tidak diinginkan tersebut, PI pada intinya hendak memberi aba-aba kepada para mantan anggota Peta, Heiho dan para pemuda untuk datang mengepung tentara Jepang jika hal tersebut benar-benar dilakukan oleh tentara Jepang.

Pada 22 September 1945 tentara Jepang datang untuk mengadakan perundingan dengan Komisaris Polisi R.P Soedarsono. Dalam perundingan itu akhirnya tidak berhasil mencapai kata sepakat. Melihat gelagat itu, Oni Sastroatmodjo segera mengkoordinir anak buahnya beserta para pemuda yang membantu PI untuk segera melakukan pengepungan terhadap tentara Jepang. Mereka akhirnya urung untuk mengadakan perlucutan senjata tersebut. Dengan demikian maksud untuk melucuti senjata terhadap PI gagal.

3. Rapat Raksasa di Kridosono pada 25 September 1945⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 52-53.

Rapat raksasa sebagai pembukaan Konggres Pelajar Seluruh Jawa. Konggres ini diprakarsai oleh Gassema (Gabungan Sekolah Menengah Mataram) yang bertujuan untuk menentukan sikap pelajar pada khususnya dan pemuda Indonesia pada umumnya dalam menghadapi kesulitan yang muncul kemudian membulatkan tekad perjuangan pemuda untuk kepentingan Republik Indonesia.

Dalam rapat ini hadir Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Paku Alam VIII dan pemimpin KNID. Sri Sultan dalam kesempatan itu menyampaikan amanat berupa tekadnya mendukung kemerdekaan Indonesia. Dia mengatakan bahwa republik yang baru berdiri sedang menuntut pengakuan resmi dari dunia internasional. Agar diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia mendapat hasil yang memuaskan, maka segenap penduduk Indonesia harus membantu dengan dua cara yaitu :

- a. Membulatkan kemauan untuk tetap merdeka
- b. Bersikap tenang dan tenteram, akan tetapi siap sedia dan berdisiplin kepada pemerintah dan peraturan dari Republik Indonesia.

Dari pidato itu tampak bahwa Sultan dengan tegas menginginkan kemerdekaan sepenuhnya, tetapi tetap dalam kerangka tata tertib yang harus ditaati secara disiplin.

4. Pengambilalihan Kantor Jepang pada 26 September 1945⁵⁸

Gerakan ini dipimpin oleh Komisaris Polisi R.P Soedarsono dengan melibatkan polisi, bagian keamanan, pegawai-pegawai Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor yang dipimpin oleh orang Jepang dan mengambil alih pabrik-pabrik serta perusahaan-perusahaan di Yogyakarta.

Pengambilalihan kantor Jepang oleh rakyat Yogyakarta ini menandai bahwa sebenarnya kekuasaan Pemerintah Daerah Yogyakarta telah berada di tangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah Yogyakarta dan KNID. Sejak saat itu pula keberanian rakyat untuk terus melakukan tekanan terhadap Jepang tetap konsisten. Dilanjutkan pada 27 September 1945 wartawan *Sinar Matahari* menguasai kantor Sinar Matahari yang disegel Jepang dan digunakan untuk menerbitkan surat kabar baru yang diberi nama *Kedaulatan Rakyat*.

Kekuatan rakyat semakin lama semakin tidak dapat dibendung. Meskipun kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan Jepang sudah diambilalih gerakan itu belum berhenti sebab kekuatan militer Jepang masih utuh. Dengan kehendak yang kuat agar Jepang segera menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan dan KNID, maka rakyat

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 56-57.

segera mengambil alih markas *Kenpeitai* (Korps Polisi Militer) di Kota Baru.

5. Penyerbuan Kota Baru pada 7 Oktober 1945⁵⁹

Penyerbuan Kota Baru yang dilakukan pada 7 Oktober 1945 ini merupakan suatu akumulasi kekuatan dari seluruh komponen masyarakat Yogyakarta. Mereka mampu mengkoordinir kekuatan secara rapi sehingga dengan koordinasi itu pula, mereka mampu melumpuhkan kekuatan-kekuatan Jepang yang masih tersisa. Sesudah sisa-sisa kekuatan Jepang ini dapat dilumpuhkan dimulailah usaha untuk mematahkan basis kekuatan Jepang di Kota Baru.

Dalam usahanya itu masyarakat Yogyakarta juga mendapat dukungan para pemuda yang berasal dari luar kota. Hal ini dilakukan oleh pemuda-pemuda desa Semarangan, Sidakerta, Godean dan sekitarnya.

Dalam situasi terisolasi dan terkepung itu pemimpin-pemimpin militer Jepang didesak untuk menyerahkan senjata dengan sukarela. Dalam perundingan itu pihak militer Jepang diwakili oleh Mayor Otsuka sebagai *Butaityo* (Kepala Kesatuan Militer) di Kota Baru, Sasaki dan Kapten Ito sedang pihak Yogyakarta diwakili oleh

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 62.

Mohammad Saleh (Ketua KNID), R.P Soedarsono (Kepala Polisi), Bardosono dan Sunjoto (wakil rakyat).

Dalam perundingan itu R.P Soedarsono meminta agar *Butaityo* Mayor Otsuka menyerahkan senjata yang ada di markas itu kepada bangsa Indonesia. Otsuka tidak menjawab dengan tegas, maka ketika anggota-anggota PI dan BKR diperintahkan masuk untuk menerima penyerahan senjata tidak mendapat apa yang diharapkan. Dengan demikian perundingan mengalami jalan buntu. Sementara PI, BKR dan massa rakyat sudah siap tempur dengan kekuatan persenjataan seadanya dengan komandan penyerbuan Umar Slamet (Ketua BKR).

Pertempuran dimulai, ketika aliran listrik pagar berduri yang mengelilingi markas Jepang sudah dipadamkan, maka pasukan yang sudah disiagakan segera menyerbu markas Jepang dan Jepang memberi perlawanan dengan memuntahkan peluru mitralyur ke arah barisan rakyat. Pasukan rakyat terus mendesak masuk ke dalam markas Jepang, sehingga terjadi peperangan satu lawan satu dari jarak dekat.

Sementara pertempuran berlangsung *Butaityo* yang bermarkas di Pingit datang ke Kota Baru. Dengan senang hati dia menyerahkan senjatanya dengan syarat anak buahnya tidak diganggu. Pimpinan penyerbu minta agar *Butaityo* Pingit menasihati Mayor Otsuka untuk mengikuti jejaknya, tetapi Otsuka belum mau menyerah. Akhirnya sekali lagi Mohammad Saleh dan R.P Soedarsono masuk menemui

Otsuka untuk menanyakan pendiriannya. Otsuka menjawab akan menyerah kepada *Yogyakarta Koo*. Maka dengan jawaban itu, perlawanan Jepang mengendor dan *Butaityo* memerintahkan anak buahnya menghentikan pertempuran.

Setelah tembakan berhenti, rakyat menyerbu masuk ke gudang senjata dan mengambil senjata sesuka hatinya, tetapi di jalan sebuah truk sudah siap menunggu dengan pengumuman agar semua senjata api diserahkan dan dimasukkan ke dalam truk itu untuk dikumpulkan oleh badan perjuangan yang sah. Akan tetapi ada juga pemuda yang tidak memperdulikan pengumuman itu dan menyelinap pergi dengan membawa senjata apinya, bahkan ada yang mengambil truk Jepang dan diisi dengan senjata rampasan terus dilarikan pulang. Dengan demikian banyak senjata Jepang yang jatuh ke tangan rakyat penyerbu markas Jepang di Kota Baru itu.

Setelah pertempuran selesai, lebih 360 orang tentara Jepang ditangkap dan diserahkan kepada pasukan Polisi Istimewa untuk dimasukkan ke penjara Wirogunan. Di pihak Jepang sembilan orang meninggal dunia dan dua puluh orang luka sedang di pihak Indonesia jatuh korban 21 orang gugur dan 32 orang luka-luka. Kecuali senjata, barang-barang dan uang milik Jepang dirampas dan diserahkan kepada KNID. Pada hari itu juga tentara Jepang yang berada di Pingit menyerah. Dengan menyerahnya tentara Jepang ini jumlah keseluruhan mencapai 1100 orang. Dengan demikian

pertempuran Kota Baru berakhir dengan kemenangan di pihak rakyat Indonesia.

6. Panghapusan Kompi AL bagian Udara di Maguwo⁶⁰

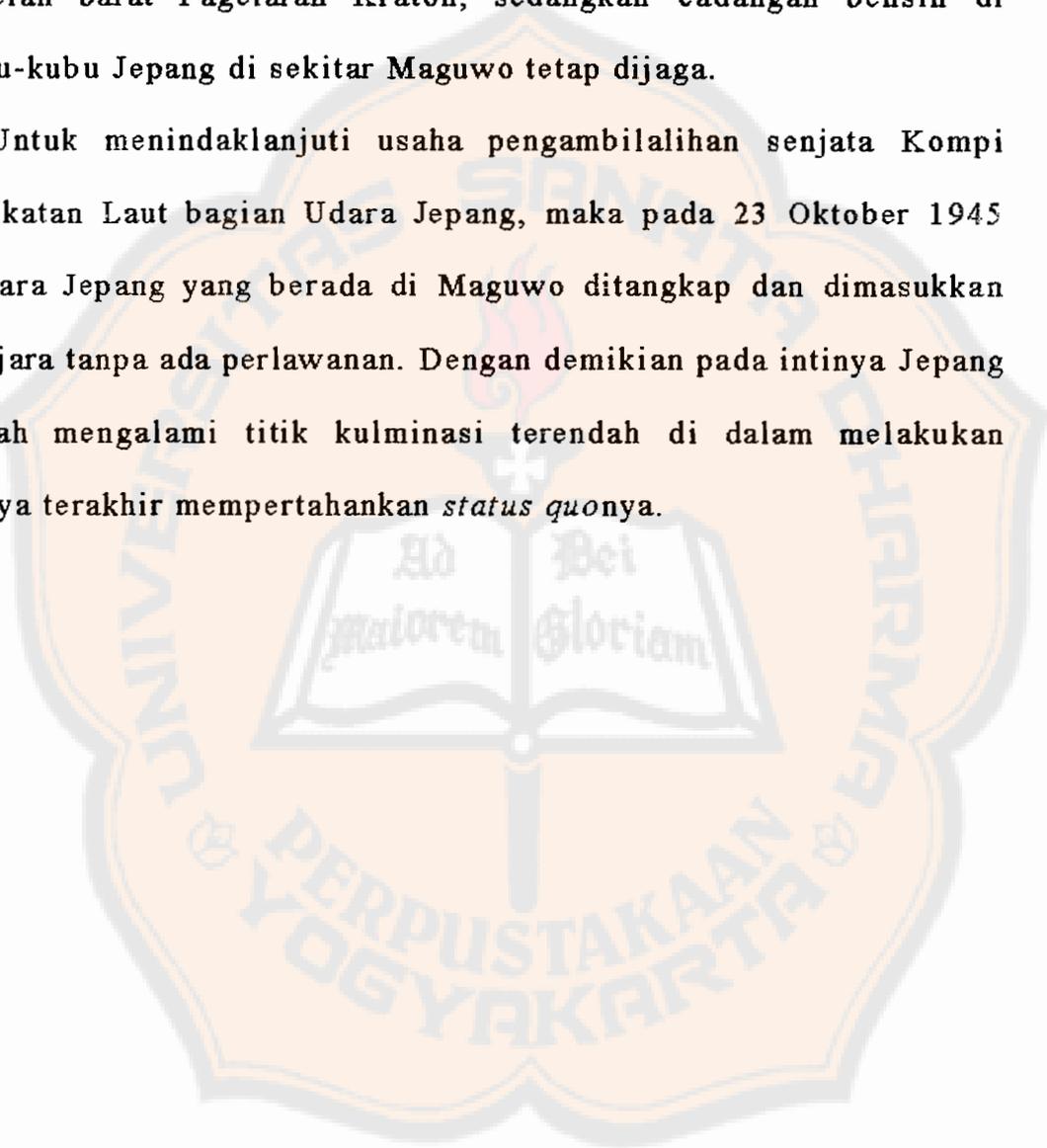
Dengan berakhirnya pertempuran Kota Baru sebenarnya kekuatan Jepang belum habis sama sekali sebab masih ada *Kaigun Kakutai* (Kompi Angkatan Laut Bagian Udara) yang masih bebas di Maguwo. Pada tanggal 13 Oktober 1945 ada desas-desus, mereka keluar dengan tank-tank lapis baja. Isu ini muncul bersamaan dengan dikeluarkannya suatu maklumat No.3 tentang Penyerahan Lambang kebaktian dan Lain-lain. Maklumat ini secara legal membersihkan masyarakat dari sisa-sisa pengaruh Jepang lewat birokrasi pemerintahan, sebab maklumat itu memerintahkan segenap penduduk menyerahkan kepada pangreh praja lambang kebaktian, surat pujian, tanda penghargaan dan tanda jabatan yang berasal dari Jepang. Untuk mengantisipasi hal tersebut pada 14 Oktober 1945 Komandan PI masuk ke Maguwo dan berunding dengan *Kaigun Taityoo* Hajiro Sosya bahwa PI akan menjaga keamanan kompleks lapangan terbang. Prakarsa PI itu disetujui oleh *Kaigun Taityoo*.

Semenjak Jepang menyerah kepada Sekutu, sebenarnya mereka semua berada di bawah pengawasan Inggris. Demikian juga *Kaigun* di Maguwo, tetapi tentara Inggris belum memasuki Yogyakarta.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 82.

Dalam perundingan itu akhirnya dicapai kesepakatan untuk mengambil persenjataan yang ada di lapangan terbang Maguwo. Atas izin Sultan senjata itu disimpan di Pracimosono, bangunan sebelah barat Pagelaran Kraton, sedangkan cadangan bensin di kubu-kubu Jepang di sekitar Maguwo tetap dijaga.

Untuk menindaklanjuti usaha pengambilalihan senjata Kompi Angkatan Laut bagian Udara Jepang, maka pada 23 Oktober 1945 tentara Jepang yang berada di Maguwo ditangkap dan dimasukkan penjara tanpa ada perlawanan. Dengan demikian pada intinya Jepang sudah mengalami titik kulminasi terendah di dalam melakukan upaya terakhir mempertahankan *status quonya*.



BAB V

KESIMPULAN

Keadaan politik Yogyakarta dalam hal ini sistem pemerintahan di Yogyakarta ternyata memberi kesempatan bagi Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengatur sendiri pemerintahan wilayah Yogyakarta, melalui tindakannya menghapuskan jabatan *Pepatih Dalem*. Penghapusan jabatan *Pepatih Dalem* ini mempunyai implikasi Sri Sultan sendirilah yang mengambil alih kepemimpinan secara langsung atas daerah Yogyakarta. Melalui kekuasaannya ini Sri Sultan segera mengambil kebijakan-kebijakan yang selaras dengan pemikirannya (anti imperialisme dan kolonialisme) yaitu di antaranya memberi dukungan terhadap dikeluarkannya Proklamasi Kemerdekaan RI dan pernyataan siap berdiri di belakang presiden dan wakil presiden RI. Tindakannya didukung oleh seluruh komponen masyarakat Yogyakarta sehingga dengan adanya dukungan ini semakin menambah kekuatan pribumi untuk melawan penjajah Jepang. Melalui persatuan inilah yang akhirnya terwujud di dalam Amanat 5 September 1945, sebagai bukti rakyat Yogyakarta siap menghadapi pihak penjajah yang akan merongrong kewibawaan RI.

Adapun faktor-faktor politik yang mendorong dikeluarkannya Amanat 5 September 1945 tidak terlepas dari pemikiran politis Sri

Sultan yang sejak awal penobatannya sebagai raja sangat menentang imperialisme dan kolonialisme. Pemikirannya ini ditindaklanjuti pula melalui upayanya menghapuskan jabatan *Pepatih Dalem* dan dukungannya terhadap dikeluarkannya Proklamasi Kemerdekaan RI. Dukungan dari seluruh komponen masyarakat Yogyakarta merupakan faktor yang sangat menentukan demi tercapainya sebuah negara yang berdaulat dan dicita-citakan bersama yaitu negara Indonesia.

Akibat politik dikeluarkannya Amanat 5 September 1945 ini mempunyai konsekuensi tersendiri baik Sri Sultan maupun bagi rakyat Yogyakarta. Melalui Amanat 5 September 1945 Sri Sultan beserta seluruh komponen masyarakat Yogyakarta mengkonsolidasikan kekuatan untuk melawan penjajah Jepang. Kekuatan ini semakin lama semakin tidak dapat terbendung lagi sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dengan pihak Jepang baik itu secara diplomasi maupun secara kekerasan. Puncak dari konflik itu terakumulasi di dalam Pertempuran Kota Baru pada tanggal 7 Oktober 1945.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Atmakusumah,(peny), *Tahta Untuk Rakyat Celah-Celah Kehidupan Hamengkubuwono IX*, PT Gramedia, Jakarta, 1982.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah* (terj), UI Press, Jakarta, 1975
- Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, PT Gramedia, Jakarta, 1992.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Kutoyo, Sutrisno, *Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, Mutiara Sumber Wijaya, Jakarta, 1996.
- Moedjanto, G, *Indonesia Abad ke-20 I*, Kanisius, Yogyakarta, 1988.
- _____, *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.
- _____, *Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.
- Notosusanto, Nugroho,dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Poerwoekoesoemo, Soedarisman, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1984.
- Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah DIY, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di DIY*, Dep P dan K, Yogyakarta, 1986.
- Soewarno, PJ, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

_____, *Yogyakarta Di Awal Revolusi Kemerdekaan*,
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 1994
Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik
Indonesia*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1982.

